
RENCANA KERJA 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG

Dinkominfo Kabupaten Temanggung
Menuju Masyarakat Informatif

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan sebuah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari ditetapkannya Rencana Strategis Dinkominfo Tahun 2024-2026 dan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan hasil evaluasi program kegiatan pada tahun berjalan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak dijumpai kekurangan disana sini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan pada masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 3 Juli 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOMINFO	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2022	12
dan Capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2019-2023	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinkominfo	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan	106
Fungsi Dinkominfo	
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	110
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	118
2.6 Inovasi Perangkat Daerah	118
2.7 Penghargaan	122
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	124
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	124
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinkominfo	125
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	128
4.1 Program dan Kegiatan	128
BAB V. PENUTUP	137
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2022 & Capaian Renstra s.d Tahun 2022
- Tabel 2.2 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinkominfo s.d Triwulan I Tahun 2023
- Tabel 2.3 : Capaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.4 : Data IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022
- Tabel 2.5 : PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, Tahun 2017-2022
- Tabel 2.6 : Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022
- Tabel 2.7 : Pendapatan Per Kapita Kab. Temanggung Tahun 2017-2022
- Tabel 2.8 : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung dari Tahun 2017-2022
- Tabel 2.9 : Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022
- Tabel 2.10 : Predikat Indeks SPBE
- Tabel 2.11 : Indeks SPBE Kabupaten Tahun 2017-2022
- Tabel 2.12 : Domain, Aspek, dan Indikator Penilaian
- Tabel 2.13 : Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2027
- Tabel 2.14 : Nilai Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2022
- Tabel 2.15 : Persentase PPID Badan Publik Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022
- Tabel 2.16 : Keaktifan PPID Pembantu Badan Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.17 : Persentase KIM Aktif Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.18 : Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.19 : Persentase Kepatuhan LPP Terhadap norma Siaran
- Tabel 2.20 : LPP di Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.21 : Area Publik Kabupaten Temanggung yang sudah terfasilitasi jaringan internet Tahun 2017-2022
- Tabel 2.22 : Lokasi area publik Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.23 : Persentase Ketersediaan Jaringan Internet Kab. Temanggung Tahun 2017-2022
- Tabel 2.24 : Detail Ketersediaan Jaringan Internet Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2022

- Tabel 2.25 : Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2022
- Tabel 2.26 : Sistem Informasi yang Terintegrasi
- Tabel 2.27 : Detail Sistem Informasi Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.28 : Persentase Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2022
- Tabel 2.29 : Data Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal s.d Tahun 2022
- Tabel 2.30 : Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022
- Tabel 2.31 : Detail Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022
- Tabel 2.32 : Tingkat Penilaian Persiapan/Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022
- Tabel 2.33 : Data Sistem Elektronik di Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.34 : Hasil *TT Security Assesment* oleh BSSN di Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.35 : Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023
- Tabel 2.36 : Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat
- Tabel 2.37 : Daftar Inovasi Perangkat Daerah
- Tabel 2.38 : Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2022
- Tabel 3.1 : Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pada Dinkominfo Kabupaten Temanggung
- Tabel 3.2 : Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pelayanan Dinkominfo
- Tabel 4.1 : Perbandingan Program dan Kegiatan Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2023
- Tabel 4.2 : Rencana Program dan Kegiatan Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2023

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 : Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan
- Gambar 2.1 : Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2022
- Gambar 2.3 : Website PPID Kabupaten Temanggung
- Gambar 2.4 : Website PPID Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah/Kecamatan
- Gambar 2.5 : Website PPID Badan Publik Kelurahan/Desa
- Gambar 2.6 : Website PPID Badan Publik Badan Usaha Milik Daerah
- Gambar 2.7 : Media Komunikasi KIM Tingkat Desa
- Gambar 2.8 : Grafik Okupansi Bandwidth Internet Publik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

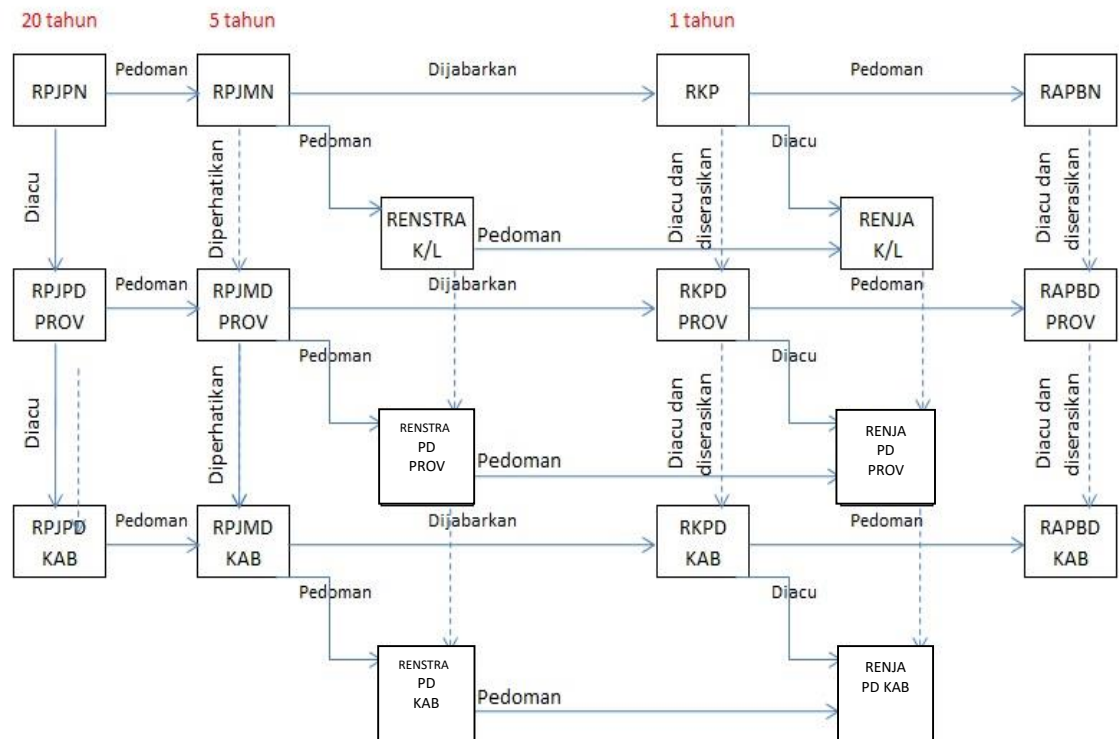
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD 2024-2026. Renstra RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang

di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja Dinkominfo Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinkominfo Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1

Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Rencana Kerja Dinkominfo Tahun 2024 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinkominfo, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinkominfo, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinkominfo;

- 2) Kondisi pelayanan Dinkominfo;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkominfo;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinkominfo;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan informasi publik.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinkominfo

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinkominfo adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinkominfo;
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinkominfo untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, dan perkiraan realisasi Tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan Tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinkominfo.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkominfo tahun lalu berdasarkan Renstra Dinkominfo

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang

timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinkominfo. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinkominfo dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program, dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinkominfo tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinkominfo;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinkominfo dan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinkominfo sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkominfo tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinkominfo. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan informasi publik dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan informasi publik;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinkominfo;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi daerah, capaian

program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);

- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian indikator kinerja daerah kegiatan Renstra Dinkominfo;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinkominfo. Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- 1) Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- 2) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 3) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinkominfo.

g. Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinkominfo.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Dinkominfo. Namun dalam proses ini Dinkominfo mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinkominfo terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis

Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian dokumen rancangan awal Renja Dinkominfo

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinkominfo merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, serta inovasi teknologi, politik, hukum, dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinkominfo

Penyempurnaan rancangan Renja Dinkominfo perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

1. Pembahasan forum Perangkat Daerah

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinkominfo dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinkominfo dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah

Dokumen rancangan Renja Dinkominfo yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinkominfo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
21. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian

- Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinkominfo Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Dinkominfo Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinkominfo untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinkominfo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinkominfo selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinkominfo Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinkominfo Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinkominfo Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinkominfo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOMINFO

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOMINFO

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinkominfo Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2022 terhadap capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinkominfo sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2022 dan Triwulan II Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2023.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-tiga pelaksanaan Renstra Dinkominfo 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinkominfo s.d Tahun 2022

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SAT UAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2021		TARGET 2022			REALISASI 2022		CAPAIAN 2022		REALISASI s/d 2022		CAPAIAN s/d 2022		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	BELANJA DAERAH				41.927.772.169		8.593.886.028		9.004.637.510	9.508.154.469		9.048.300.408				17.848.951.236		42,57	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				17.018.051.419		3.298.702.405		3.469.007.610	4.060.600.544		3.930.985.090				7.436.452.295		43,70	
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100		100		100			100		100		100		100		
2.16.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.689.802.459		3.058.518.054		3.219.307.000	3.323.088.594		3.215.901.229				6.274.419.283		39,99	
2.16.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai	Bulan	70	15.689.802.459	36	3.058.518.054	12	3.219.307.000	3.323.088.594	12	3.215.901.229	100	96,77	48	6.274.419.283	68,57	39,99	
2.16.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				664.400.000		206.764.800		-	305.756.000		301.391.250				508.156.050		76,48	
2.16.01.2 .02.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan kepada masyarakat	paket	16	664.400.000	4	206.764.800	6	-	305.756.000	6	301.391.250	100	98,57	10	508.156.050	62,50	76,48	
2.16.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				565.323.060		78.450.769		131.310.310	55.390.150		55.289.157				133.739.926		23,66	
2.16.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	60	45.659.800	36	9.256.550	12	9.997.650	3.499.050	12	3.498.500	100	99,98	48	12.755.050	80,00	27,93	
2.16.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	60	68.883.660	36	11.526.300	12	14.861.660	12.990.000	12	12.981.500	100	99,93	48	24.507.800	80,00	35,58	
2.16.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	Bulan	60	49.495.600	36	6.962.750	12	11.000.000	8.413.600	12	8.412.600	100	99,99	48	15.375.350	80,00	31,06	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SAT UAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2021		TARGET 2022			REALISASI 2022		CAPAIAN 2022		REALISASI s/d 2022		CAPAIAN s/d 2022		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.16.01.2 .06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Bulan	60	130.818.000	36	15.996.050	12	35.500.000	501.500	12	445.000	100	88,73	48	16.441.050	80,00	12,57	
2.16.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas	Bulan	60	270.466.000	36	34.709.119	12	59.951.000	29.986.000	12	29.951.557	100	99,89	48	64.660.676	80,00	23,91	
2.16.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				474.732.200		97.923.303		103.390.300	119.427.200		104.550.745				202.474.048		42,65	
2.16.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan jasa pengiriman surat	Bulan	60	10.060.000	36	1.381.500	12	5.000.000	3.075.000	12	2.875.000	100	93,50	48	4.256.500	80,00	42,31	
2.16.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening tagihan telepon	Bulan	60	48.642.000	36	5.369.479	12	7.400.000	6.000.000	12	5.360.860	100	89,35	48	10.730.339	80,00	22,06	
2.16.01.2 .08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	60	70.285.800	36	14.031.600	12	11.995.300	11.357.700	12	11.272.300	100	99,25	48	25.303.900	80,00	36,00	
2.16.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium SS Sekretariat, tenaga kebersihan, dan tersedianya penyediaan jasa kantor	Bulan	60	345.744.400	36	77.140.724	12	78.995.000	98.994.500	12	85.042.585	100	85,91	48	162.183.309	80,00	46,91	
2.16.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				288.193.700		63.810.279		15.000.000	256.938.600		253.852.709				317.662.988		110,23	
2.16.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terlaksananya pembelian BBM dan penggantian sukucadang kendaraan dinas/operasional	Bulan	60	288.193.700	36	63.810.279	12	15.000.000	73.496.600	12	72.265.109	100	98,32	48	136.075.388	80,00	47,22	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SAT UAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2021		TARGET 2022			REALISASI 2022		CAPAIAN 2022		REALISASI s/d 2022		CAPAIAN s/d 2022		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Operasional atau Lapangan																		
2.16.01.2 .09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Teralisasinya renovasi atap dan plavond lantai 4 Kantor Dinas Kominfo	Paket	1	99.076.800	0	0	1	-	183.442.000	1	181.587.600	100	98,99	1	181.587.600	100	183,28	
									Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 2.16.01			100					75,27		
									Predikat			Sangat Tinggi							
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				10.326.997.050		2.807.760.930		3.321.991.900	3.077.682.800		2.800.494.067				5.608.254.997		54,31	
		Persentase PPID badan publik yang aktif	%	20		14,66		18,00			18,18		100		18		90,90		
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	30		21,88		25,00			28,13		100		28		93,77		
		Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100		100		100			100		100		100		100		
2.16.02.2 .01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				10.326.997.050		2.807.760.930		3.321.991.900	3.077.682.800		2.800.494.067				5.608.254.997		54,31	
2.16.02.2 .01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Produksi dan Updating Konten Berita/Informasi melalui Portal Berita Milik Pemerintah Daerah (Website, Media Center, HEBAT, Media Sosial) Terlaksananya Penyiaran LPPL Temanggung TV dan LPPL Radio Temanggung; Tersedianya Buku dan	Bulan	60	9.099.136.650	36	2.589.690.129	12	3.044.992.100	2.866.818.800	12	2.600.222.067	100	90,70	48	5.189.912.196	80,00	57,04	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SAT UAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2021		TARGET 2022			REALISASI 2022		CAPAIAN 2022		REALISASI s/d 2022		CAPAIAN s/d 2022		KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Video Profil Kabupaten Temanggung																		
2.16.02.2 .01.06	Pelayanan Informasi Publik	Pengelolaan dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung Sesuai UU KIP; Layanan Informasi Kepada Masyarakat Melalui Fasilitas MCAP	Bulan	60	640.308.400	36	115.278.205	12	152.000.000	83.148.000	12	75.204.000	100	90,45	48	190.482.205	80,00	29,75		
2.16.02.2 .01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terselenggaranya Operasional dan Pelatihan TIK Kepada Masyarakat Melalui Pusat Komunitas Kreatif (Puskomkref)	Bulan	60	587.552.000	36	102.792.596	12	124.999.800	127.716.000	12	125.068.000	100	97,93	48	227.860.596	80,00	38,78		
									Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 2.16.02			100					80,00			
									Predikat			Sangat tinggi								
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				12.997.943.500		2.286.694.168		1.933.638.000	2.157.038.825		2.109.464.179				4.396.158.347		33,82		
		Persentase ketersediaan akses internet publik	%	100		73,33		100			80,00		80,00		80		80,00			
		Persentase ketersediaan jaringan intranet	%	100		100		100			84,11		84,11		84,11		84,11			
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	50		16,99		40,00			52,48		100		52,48		100			
		Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	%	60		52,15		55,00			71,29		100		71,29		100			
2.16.03.2 .01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup				9.146.909.100		1.523.037.242		1.543.638.000	1.553.984.825		1.547.907.749				3.070.944.991		33,57		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SAT UAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2021		TARGET 2022			REALISASI 2022		CAPAIAN 2022		REALISASI s/d 2022		CAPAIAN s/d 2022		KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																			
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya IP publik Pemerintah Kabupaten Temanggung, Website dan terstrukturanya domain OPD Kabupaten Temanggung	IP Publik, Domain Sub domain	5	423.215.000	3	77.696.450	1	90.000.000	32.000.000	1	31.924.000	100	99,76	4	109.620.450	80,00	25,90		
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya sewa akses bandwidth LPSE , OPD UPT desa/kelurahan dan internet publik (e-Government)	Mbps	3500	8.723.694.100	2100	1.445.340.792	800	1.453.638.000	1.521.984.825	800	1.515.983.749	100	99,61	2900	2.961.324.541	82,85	33,95		
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3.851.034.400		763.656.926		390.000.000	603.054.000		561.556.430				1.325.213.356		34,41		
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi online Pemerintah Kabupaten Temanggung	Bulan	60	1.417.844.400	36	66.765.396	12	70.000.000	270.859.000	12	266.067.580	100	98,23	48	332.832.976	80,00	23,47		
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terselenggaranya pengelolaan sistem informasi, fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem informasi OPD Kabupaten Temanggung	Apl.	462	1.175.464.500	462	222.023.138	98	120.000.000	85.618.000	100	78.964.200	100	92,23	562	300.987.338	100	25,61		
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terselenggarakannya pengelolaan e-government / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab Temanggung	Bulan	60	1.257.725.500	36	474.868.392	12	200.000.000	246.577.000	12	216.524.650	100	87,81	48	691.393.042	80,00	54,97		
									Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 2.16.03			100				80,90				
									Predikat			Sangat tinggi								

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SAT UAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2021		TARGET 2022			REALISASI 2022		CAPAIAN 2022		REALISASI s/d 2022		CAPAIAN s/d 2022		KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL				1.385.711.900		172.156.065		230.000.000	127.832.500		124.309.600				296.465.665		21,39		
		Cakupan ketersediaan data makro daerah	%	100		100		100			100		100		100		100			
2.20.02.2 .01	Penyelenggara an Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				1.385.711.900		172.156.065		230.000.000	127.832.500		124.309.600				296.465.665		21,39		
2.20.02.2 .01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terwujudnya ketersediaan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan pembangunan	Dok.	23	1.118.056.400	3	128.726.751	3	180.000.000	99.999.500	3	99.241.600	100	99,24	6	227.968.351	26,09	20,39		
2.20.02.2 .01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terwujudnya 1 data dan 1 peta di Kabupaten Temanggung	keg	1	267.655.500	1	43.429.314	1	50.000.000	27.833.000	1	25.068.000	100	90,07	1	68.497.314	100	25,59		
									Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 2.20.02				100				100			
									Predikat				Sangat tinggi							
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				199.068.300		28.572.460		50.000.000	84.999.800		83.047.472				111.619.932		56,07		
		Tingkat kesiapan penilaian / pengelolaan resiko keamanan informasi	%	1,00		1,00		1,00			4,00		100		4,00		100			
2.21.02.2 .01	Penyelenggara an Persandian untuk Pengamanan Informasi				199.068.300		28.572.460		50.000.000	84.999.800		83.047.472		97,70		111.619.932		56,07		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SAT UAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2021		TARGET 2022			REALISASI 2022		CAPAIAN 2022		REALISASI s/d 2022		CAPAIAN s/d 2022		KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																			
2.21.02.2 .01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan pengamanan informasi pemerintah daerah	Bulan	60	199.068.300	36	28.572.460	12	50.000.000	84.999.800	12	83.047.472	100	97,70	48	111.619.932	80,00	56,07		
									Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 2.21.02			100					80,00			
									Predikat			Sangat tinggi								
JUMLAH					41.927.772.169		8.593.886.028		9.004.637.510	9.508.154.469		9.048.300.408				17.848.951.236				
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH		100	95,16					
												PREDIKAT		Sangat Tinggi						
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH		96,01						
												PREDIKAT		Akan Tercapai						

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinkominfo
s.d Triwulan II Tahun 2023

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATU AN	TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
				K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA DAERAH				12.765.570.762	10.045.245.683		1.604.757.367		15,98	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				4.026.854.238	4.064.326.083		813.117.614		20,01	
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100			100		100		
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.749.103.038	3.446.642.383		734.858.046		21,32	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai	Bulan	12	3.749.103.038	3.446.642.383	3	734.858.046	25	21,32	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				305.756.000	300.000.000		2.880.000		0,96	
2.16.01.2.02.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan kepada masyarakat	paket	6	305.756.000	300.000.000		2.880.000	0	0,96	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				90.784.200	130.729.500		41.513.480		31,76	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	5.000.000	5.000.000	3	340.000	25	6,80	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	paket	3	-	39.982.000	2	22.760.000	67	56,93	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	13.000.000	13.000.000	3	4.865.000	25	37,42	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	Bulan	12	9.500.000	9.500.000	3	1.039.500	25	10,94	
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Bulan	12	30.284.200	30.260.000	3	7.890.000	25	26,07	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas	Bulan	12	33.000.000	32.987.500	3	4.618.980	25	14,00	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				118.967.000	118.964.200		22.157.504		18,63	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan jasa pengiriman surat	Bulan	12	3.075.000	3.075.000	3	1.205.000	25	39,19	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening tagihan telepon	Bulan	12	6.000.000	5.998.800	3	1.367.376	25	22,79	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATU AN	TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
				K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	11.000.000	10.999.000	3	-	25	0,00	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium SS Sekretariat, tenaga kebersihan, dan tersedianya penyediaan jasa kantor	Bulan	12	98.892.000	98.891.400	3	19.585.128	25	19,80	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				68.000.000	67.990.000		11.708.584		17,22	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pembelian BBM dan penggantian sukucadang kendaraan dinas/operasional	Bulan	12	68.000.000	67.990.000	3	11.708.584	25	17,22	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 2.16.01									26		
Predikat											
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				5.431.552.400	3.367.210.300		462.568.199		13,74	
		Persentase PPID badan publik yang aktif	%	20,00			18,18		90,90		
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	30,00			53,57		100		
		Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100			100		100		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5.431.552.400	3.367.210.300		462.568.199		13,74	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Produksi dan Updating Konten Berita/Informasi melalui Portal Berita Milik Pemerintah Daerah (Website, Media Center, HEBAT, Media Sosial) Terlaksananya Penyiaran LPPL Temanggung TV dan LPPL Radio Temanggung; Tersedianya Buku dan Video Profil Kabupaten Temanggung	Bulan	12	5.081.936.000	3.256.363.500	-	437.487.749	0	13,43	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Pengelolaan dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung Sesuai UU KIP; Layanan Informasi Kepada Masyarakat Melalui Fasilitas MCAP	Bulan	12	83.148.000	83.148.000	-	18.807.600	0	22,62	
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terselenggaranya Operasional dan Pelatihan TIK Kepada Masyarakat Melalui Pusat Komunitas Kreatif (Puskomkref)	Keg	4	266.468.400	27.698.800	-	6.272.850	0	22,65	integrasi keg DBHCHT
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 2.16.02									-		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATU AN	TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
				K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Predikat											
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				2.906.578.624	2.455.876.300		290.008.454		11,81	
		Persentase ketersediaan akses internet publik	%	100			80,00		80,00		
		Persentase ketersediaan jaringan intranet	%	100			100,00		100		
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	50,00			51,92		100		
		Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	%	60,00			75,00		100		
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.658.564.656	1.555.718.000		247.414.694		15,90	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya sewa akses bandwidht LPSE, OPD UPT desa/kelurahan dan internet publik (e-Government)	Mbps	800	1.658.564.656	1.555.718.000	-	247.414.694	0	15,90	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.248.013.968	900.158.300		42.593.760		4,73	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi online Pemerintah Kabupaten Temanggung	Bulan	12	27.322.328	27.322.300	-	2.190.950	0	8,02	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terselenggaranya pengelolaan sistem informasi, fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem informasi OPD Kabupaten Temanggung	Aplika si	10	110.924.656	85.618.000	3	22.016.060	30	25,71	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya proses integrasi sistem infomasi dalam rangka pengelolaan egovernment/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab Temanggung	Aplika si	6	184.766.984	62.218.000	2	18.386.750	33	29,55	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemereintah Daerah	Tersedianya peralatan multi media pada kelompok masyarakat	Bulan	12	925.000.000	725.000.000	-	-	0	0,00	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 2.16.03									13		
Predikat											
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				302.833.000	107.833.000		11.481.350		10,65	
		Cakupan ketersediaan data makro daerah	%	100			-		-		

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATU AN	TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
				K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				302.833.000	107.833.000		11.481.350		10,65	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terwujudnya ketersediaan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan pembangunan	Dok.	3	275.000.000	80.000.000	-	5.208.500	0	6,51	
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terwujudnya 1 data dan 1 peta di Kabupaten Temanggung	keg	1	27.833.000	27.833.000	-	6.272.850	0	22,54	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 2.20.02									-		
Predikat											
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				97.752.500	50.000.000		27.581.750		55,16	
		Tingkat kesiapan penilaian / pengelolaan resiko keamanan informasi	%	1,00			1,92		100		
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				97.752.500	50.000.000		27.581.750		55,16	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan pengamanan informasi pemerintah daerah	Bulan	12	97.752.500	50.000.000	-	27.581.750	0	55,16	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 2.21.02									0		
Predikat											
JUMLAH						12.765.570.762	10.045.245.683		1.604.757.367		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH									8	15,98	
PREDIKAT									Sangat Tinggi		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH									85,66		
PREDIKAT									Akan Tercapai		

Dari Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinkominfo di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinkominfo berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - h. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - j. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - k. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - l. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - m. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - n. Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - o. Pelayanan Informasi Publik;
 - p. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik;
 - q. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - r. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
 - s. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;
 - t. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas;

- u. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;
 - v. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah;
 - w. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2022, maka dapat dikatakan bahwa Dinkominfo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Baik** yaitu dengan nilai 96,15%,. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja sasaran strategis Dinkominfo yaitu Sasaran Strategis **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik dan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik**.

Dari Tabel 2.1. dan tabel 2.2 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2022 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinkominfo

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan IKPD adalah memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja perangkat daerah dalam kurun waktu tertentu.

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinkominfo dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung s.d Triwulan II Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN s/d 2022 (%)	STATUS
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
A														
INDIKATOR MAKRO DAERAH														
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	69,22	69,57	69,84	70,16	70,49	69,56	69,57	69,88	70,77	-	100	TT
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,2	-2,00	2,50	3,50	4,80	5,05	-2,13	-2,13	3,34	-	69,58	UK
3	Pendapatan per Kapita	Nilai	27,5	27,23	27,68	28,45	29,57	28,05	27,23	27,70	28,48	-	96,31	AT
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,2	3,85	3,50	3,50	3,50	2,99	3,85	2,62	2,54	-	100	TT
B														
INDIKATOR SASARAN														
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	nilai	2,5	2,75	2,85	2,90	3,00	2,82	3,61	2,78	3,12	-	100	TT
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	nilai	78,30	80,03	95,60	95,70	96,00	80,03	95,50	89,56	88,33	-	92,30	AT
C														
INDIKATOR PROGRAM														
1	Persentase PPID badan publik yang aktif	%	9,00	12,00	15,00	18,00	20,00	10,70	13,20	14,66	18,18	-	90,91	AT
2	Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	15,63	15,63	21,88	28,13	-	93,75	AT
3	Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	TT
4	Persentase ketersediaan akses internet publik	%	80	90	100	100	100	68,33	73,33	73,33	80,00	-	80,00	AT
5	Persentase ketersediaan jaringan intranet	%	100	100	100	100	100	80,25	82,03	88,10	84,11	-	84,11	AT
6	Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	15,00	20,00	30,00	40,00	50,00	13,23	16,17	16,99	52,48	-	100	TT
7	Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	%	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	40,13	52,27	52,15	71,29	-	100	TT
8	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	66,67	100	-	100	TT
9	Tingkat Kesiapan Penilaian /Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi	%	1	1	1	1	1	1,08	4,41	8,82	4,00	-	100	TT

Penjelasan untuk masing-masing indikator kinerja program adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 5 (lima) indikator terdiri dari:
 - a. Persentase Kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran:
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Pemahaman dan kepatuhan merata insan penyiaran terhadap P3 (Pedoman Program Siaran) dan SPS (Standar Program Siaran).
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah sering berganti-gantinya SDM penyiar, terutama di Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), serta tidak adanya kelompok masyarakat yang ikut berperan aktif melakukan pemantauan siaran.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah terus melaksanakan program yang telah berjalan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemantauan isi siaran.
 - b. Persentase sistem informasi yang terintegrasi
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kesadaran akan keamanan jaringan dan kemudahan yang diperoleh dari integrasi jaringan, PD secara mandiri telah memiliki akses internet dengan berlangganan ke ISP.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah terdapat sistem informasi/aplikasi dari beberapa perangkat daerah yang dibangun oleh pihak ketiga didalam pengelolaan server, aplikasi dan *database* tidak diserahkan sepenuhnya kepada tim teknologi informasi internal daerah sehingga kesulitan dalam proses integrasi data. Factor penghambat lainnya adalah belum adanya standar baku pembangunan dan pengembangan sistem informasi, serta belum tercukupinya peralatan jaringan di seluruh PD.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut

adalah melakukan pemantapan dan koordinasi antar perangkat daerah untuk memberikan sepenuhnya dalam pengelolaan server, aplikasi dan database yang dibangun oleh pihak ketiga kepada tim Teknologi Informasi internal sehingga bisa dilakukan analisa terhadap data sebagai langkah awal proses integrasi. Disamping itu, perlu dilakukan standarisasi platform dalam pengembangan sistem informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

c. Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah untuk menggunakan teknologi informasi dalam proses bisnis pada masing-masing perangkat daerah, serta meningkatnya kemauan dan kemampuan dalam pengelolaan sistem informasi
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya peran serta dari pengguna aplikasi di dalam proses implementasi pada pelaksanaan penerapan teknologi informasi, serta belum adanya standar baku pengelolaan sistem informasi, serta terbatasnya SDM di bidang TIK
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah umpan balik dari pengguna aplikasi pada setiap proses implementasi sistem informasi sehingga akan ada tindak lanjut dalam pelaksanaan penerapan teknologi informasi.

d. Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Sinergitas kerja sama Dinkominfo dan BPS Temanggung dan Ketersediaan data di tiap OPD.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Beberapa data statistik yang terkumpul tidak tepat waktu karena ada beberapa perubahan rekonsiliasi dari provinsi, sementara OPD tidak

mempunyai kewenangan untuk melakukan pendataan secara mandiri (menunggu dari BPS).

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah untuk meminta bantuan Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung menyediakan data makro daerah sesuai jadwal evaluasi pembangunan di kabupaten Temanggung dengan angka proyeksi atau perhitungan sementara, agar tidak digunakan data makro daerah tahun sebelumnya (data n-2) untuk evaluasi pembangunan yang dievaluasi saat ini (data n-1).

e. Tingkat Kesiapan Penilaian/Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah semakin banyaknya aplikasi dan web yang dikelola oleh Dinas Kominfo yang memerlukan pengamanan informasi sehingga aplikasi yang dijalankan benar benar sudah melalui tes/pengujian pengamanan.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya peralatan pendukung kegiatan pengamanan informasi seperti komputer/laptop dengan spesifikasi yang memadai untuk melaksanakan *Pentest* terhadap aplikasi maupun web di lingkup Pemerintah Daerah.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Koordinasi dengan BSSN untuk dapat melaksanakan kegiatan ITSA setiap tahun dan pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk pelaksanaannya.

2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 2 (dua) terdiri dari:

a. Persentase PPID badan publik yang aktif

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Keaktifan dari PPID utama Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan pendampingan, pembinaan dan jemput bola kepada PPID

pelaksana. Monev rutin terkait kelengkapan kelembagaan dan data PPID pelaksana yang dilaksanakan tiap triwulan.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah mutasi pegawai yang menjadi pengelola/admin PPID pada Badan Publik yang mengakibatkan pemahaman terkait Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi dimulai dari awal kembali. Disamping itu juga masih belum kuatnya kesadaran di tingkat PPID Badan Publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah penguatan kapasitas SDM pengelola dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada PPID Badan Publik. Hal-hal terkait PPID tidak diserahkan kepada satu orang saja, tetapi tim, sehingga apabila mutasi, pemahaman tentang PPID tidak menjadi dari awal lagi. Direncanakan ke depan akan diadakan KIP Award tingkat Kabupaten Temanggung untuk memacu Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

b. Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang aktif

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Semangat masyarakat dalam turut serta mendesiminasikan dan meningkatkan literasi informasi.
- 2) Faktor penghambat : Secara kegiatan semua sudah jalan hanya administrasi tentang pencatatan, pendokumentasian dan pelaporannya saja yang belum maksimal.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah tetap memberikan pelatihan dan pendampingan kepada Kelompok Informasi Masyarakat secara berkesinambungan, mengaktifkan kelompok informasi masyarakat

yang belum aktif di wilayah Kabupaten Temanggung.

c. Persentase ketersediaan akses internet publik

1) Faktor pendorong indikator tersebut terdiri atas faktor teknis dan non teknis. Secara teknis beberapa hal yang mendorong capaian indikator adalah:

a) kecukupan bandwidth untuk area publik didukung oleh penyedia ISP dengan jalur terpisah dari jalur utama Jaringan Internet Pemerintah Daerah sehingga secara beban bandwidth cenderung stabil dan tercukupi.

b) tersedianya jaringan internet secara mandiri non jaringan kominfo pada beberapa fasilitas publik seperti puskesmas seharusnya bisa menjadi salah satu pendukung tercapainya indikator ketersediaan akses internet publik. Namun hal tersebut akan menjadi layanan dengan tampilan berbeda karena tidak melalui landing page / login page jaringan publik kominfo, dimana pada halaman login terdapat informasi Free Wifi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

c) lokasi pada daftar area publik yang menjadi target kegiatan berdasarkan tinjauan pemetaan jaringan sangat memungkinkan untuk dilakukan koneksi sehingga bisa diselenggarakan hotspot untuk area tersebut.

2) Faktor penghambat indikator tersebut terdiri atas beberapa hal, diantaranya adalah:

a) beberapa lokasi area publik belum tersedia jaringan listrik untuk peralatan jaringan seperti pada citywalk, taman-taman dan pasar sehingga perlu ada pekerjaan ekstra untuk menggelar jaringan kelistrikan. Namun demikian diantara lokasi tersebut bisa dilakukan koneksi jalur kelistrikan sehingga

layanan hotspot area publik bisa tercapai.

b) beberapa peralatan yang ada pada lokasi eksisting pelayanan hotspot area publik rusak dan bahkan sudah tidak ada pada tempatnya, besar kemungkinan hilang. Dinas Kominfo telah melakukan pengecekan ke seluruh lokasi eksisting untuk pendataan dan kalkulasi kebutuhan penggantian alat yang rusak dan hilang.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah:

a) lokasi area publik yang saat ini belum terlayani hotspot akses internet publik akan dilakukan koneksi jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun 2023.

b) Semua proses penggantian, perbaikan dan penambahan akses baru dilaksanakan pada tahun Anggaran 2023.

d. Persentase ketersediaan jaringan intranet

Ketersediaan jaringan intranet pada dasarnya adalah jaringan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. ketersediaan jaringan internet sejak tahun 2019 s.d 2022 cenderung meningkat, karena tahapan pengembangan distribusi jaringan sesuai dengan perencanaan serta dukungan penganggaran. Dari target 395 kantor Pemerintahan dan layanan Pemerintah telah terhubung dengan Jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung sejumlah 333 kantor yang terdiri atas Bupati/Pengayoman, Kantor Perangkat daerah, Kecamatan, Kelurahan, Desa, UPT/eksUPT dan Kantor Pelayanan Pemerintah. 62 Kantor belum terhubung dengan jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang keseluruhannya merupakan Kantor Pemerintah Desa. Kantor Pemerintah Desa yang belum terhubung dengan

jaringan Internet Pemkab bukan berarti tidak memiliki jaringan internet, namun justru dikarenakan telah memiliki jaringan internet secara mandiri dengan anggaran sendiri maka tidak melakukan permohonan koneksi jaringan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kominfo. Sehingga secara status jaringan tidak tercover oleh jaringan intra.

- 1) Faktor pendorong indikator ketersediaan jaringan intranet secara teknis adalah :
 - a) Telah tersedia *repeater* di beberapa lokasi yang dapat mendukung koneksi jaringan ke kantor-kantor pemerintah desa tersebut.
 - b) Dari sisi kemampuan dan *occupancy* kapasitas alat masih mencukupi untuk mengcover beban trafik internet maupun intranet kantor-kantor Pemerintah Desa tersebut.
 - c) Telah diaktifkan jaringan VPN (Virtual Private Network) Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mengakomodir kantor-kantor pemerintah desa yang belum terhubung dengan jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk melakukan akses pada aplikasi yang bersifat internal dan berjejaring intra. Sehingga tidak ada kendala manakala Kantor tersebut belum terhubung secara langsung dengan jaringan lokal Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah belum adanya kebijakan yang mengatur secara detil terkait dengan layanan internal Pemerintah Daerah yang bersifat tertutup dengan jaringan intra secara efektif. Aplikasi internal masih menggunakan jalur internet karena dengan alasan untuk kemudahan akses meskipun memiliki resiko kerawanan keamanan data. Hal ini menjadikan Kantor Desa yang telah memiliki jaringan internet secara mandiri di luar jaringan Pemerintah

Kabupaten tidak begitu membutuhkan jaringan intra Pemerintah dalam melakukan proses kerja dan pelayanan.

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah:
 - a) Penegasan kebijakan beragam aplikasi yang bersifat internal dengan menggunakan jalur tertutup/jaringan intra Pemerintah sehingga ada jaminan keamanan data.
 - b) Pemanfaatan jaringan intra pemerintah yang didukung dengan kapasitas penyimpanan besar untuk memberikan layanan penyimpanan *cloud* bagi data pelayanan kependudukan di desa. Hal ini diharapkan akan mendorong antusias Pemerintah Desa dalam pemanfaatan jaringan intra Pemerintah.
 - c) Pemanfaatan VPN (*Virtual Private Network*) menjadi pilihan terakhir untuk mengcover kebutuhan jaringan intra bagi Kantor Pemerintah yang tidak terhubung secara langsung dengan jaringan Pemerintah Kabupaten. Jika VPN telah efektif berlaku untuk kebutuhan jaringan tertutup, maka secara keseluruhan kantor Pemerintahan telah tersedia jaringan intranet.

3. Capaian indikator dengan status upaya keras tidak ada.

2.2.2. Data Pokok pembangunan

Data pokok pada Dinkominfo terdiri dari 4 jenis data pokok yaitu Data Makro Daerah, Data Pokok Bidang Komunikasi dan Informatika, Data Pokok Bidang Statistik, dan Data Pokok Bidang Persandian dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Makro Daerah
 - a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

United Nations Development Programme (UNDP) merekomendasikan bahwa martabat manusia seharusnya menjadi tujuan hakiki pembangunan sebuah negara. Manusia yang bermartabat adalah manusia yang dapat menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (*human development report 1990*). Dengan pentingnya pembangunan manusia tersebut maka hingga kini ukuran yang dijadikan keberhasilan pembangunan manusia sebuah negara adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Konsep pembangunan manusia itu sendiri pada dasarnya memiliki makna yang sangat luas yang mencakup semua dimensi dasar yang dimiliki manusia, namun konsep ini pada intinya cukup sederhana, yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan serta perubahan dalam kesejahteraan manusia.

Metodologi perhitungan IPM terdiri dari komponen sebagai berikut:

1) *Kependudukan*

Data kependudukan yang berhubungan dengan perhitungan IPM yaitu jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan rasio ketergantungan penduduk.

2) *Kesehatan*

Tingkat kesehatan penduduk dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menderita sakit yang secara langsung berpengaruh dengan aktifitas sehari-hari, selain itu juga data tentang jumlah kepemilikan jaminan. Aspek kesehatan dalam perhitungan IPM tercermin dari Angka Harapan Hidup.

3) *Pendidikan*

Aspek pendidikan dapat tercermin dari data persentase partisipasi sekolah, partisipasi sekolah dapat diukur dengan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka partisipasi Murni (APM).

4) *Ekonomi*

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi di suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang dijadikan parameter untuk mengukur perkembangan ekonomi dalam perhitungan IPM.

5) *Kemiskinan*

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar masyarakat dapat teratasi, diantaranya adalah pengentasan kemiskinan. Sehingga tingkat kemiskinan menjadi salah satu parameter yang berpengaruh dalam perhitungan IPM.

6) *Ketenagakerjaan*

Aspek ketenagakerjaan menjadi penting dalam perhitungan IPM dikarenakan berkaitan langsung dengan kualitas manusia dalam bidang pekerjaan yang berujung dengan tingkat pendapatan dan kesejahteraan manusia. Indikator IPM dibidang ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Persentase Penduduk menurut lapangan Usaha.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Temanggung diklasifikasikan dengan kategori sebagai berikut:

- Sangat tinggi : $IPM \geq 80$
- Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
- Sedang : $60 \leq IPM < 70$
- Rendah : $IPM < 60$

Berdasarkan perhitungan sementara nilai IPM di Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar 70,77 masuk kedalam kategori sedang.

Tabel 2.4
Data IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022

TAHUN	IPM
2017	68,34
2018	68,83
2019	69,56
2020	69,57
2021	69,88
2022	70,77

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 sampai dengan 2022 mengalami tren kenaikan, hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Temanggung terus meningkat, aspek-aspek yang menjadi komponen penilaian ASPM yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemiskinan dan ketenagakerjaan secara umum meningkat dari tahun ke tahun.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 1985). Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun, baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan.

Di bawah ini akan diperlihatkan besarnya PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung baik atas dasar harga berlaku maupun

atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2010 dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2.5
PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, Tahun 2017-2022

Tahun	ADHB		ADHK 2010	
	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
2017	18.807.712,01	7,17	13.776.254,81	5,03
2018	20.254.482,86	7,69	14.483.255,21	5,13
2019	21.657.397,07	6,93	15.214.058,87	5,05
2020	21.557.948,69	-0,46	14.890.753,23	-2,13
2021	22.627.792,08	4,96	15.387.930,43	3,34
2022*	22.627.792,08	4,96	15.387.930,43	3,34

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

* Data tahun 2022 masih sama dengan tahun 2021

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan keadaan sebenarnya, menggunakan angka PDRB atas dasar konstan dikarenakan PDRB atas harga berlaku masih terpengaruh adanya faktor kenaikan harga (inflasi). Penggunaan tahun dasar 2010 sesuai rekomendasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008), yaitu standar internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip ekonomi.

Pada tahun 2022 besaran PDRB menurut harga konstan di Kabupaten Temanggung secara agregat mencapai 15.387.930,43 juta rupiah. Angka itu masih menggunakan angka PDRB tahun 2021 dikarenakan perhitungan di tahun 2022 belum selesai, PDRB dihitung dengan data tahun sebelumnya (n-1). Dibandingkan dengan PDRB tahun 2020, mengalami kenaikan sebesar Rp. 497.177,20 juta rupiah, atau mengalami kenaikan sebesar 3.34 %.

Tabel 2.6
Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah
dan Nasional Tahun 2017-2022

Tahun	Pertumbuhan ekonomi		
	Temanggung	Jateng	Nasional
2017	5,03	5,27	5,07
2018	5,13	5,32	5,17
2019	5,05	5,41	5,02
2020	-2,13	-2,65	-2,07
2021	3,34	3,24	3,69
2022 *	3,34	3,24	3,69

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

** Data Pertumbuhan Ekonomi tahun 2022 untuk Kabupaten Temanggung masih sama dengan tahun 2021*

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk tahun 2022 pertumbuhan ekonomi baik di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional mengalami perlambatan ekonomi sebagai akibat dari terjadinya pandemi Covid-19. Perlambatan ekonomi Kabupaten Temanggung sebesar -2,13 persen lebih rendah dari Nasional yang sebesar -2,07, namun masih lebih tinggi daripada Jawa Tengah yang sebesar -2,65 persen.

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 belum dapat disajikan dikarenakan perhitungan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh BPS Temanggung menggunakan data n-1 sehingga baru bisa diketahui di tahun 2023.

c. Pendapatan Per kapita

Pendapatan Per Kapita adalah jumlah rata-rata besaran pendapatan berupa nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Cara mendapatkan besaran Pendapatan Per Kapita adalah dengan membagi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut. Pendapatan Per Kapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan

perekonomian suatu wilayah khususnya tingkat kemakmuran penduduk secara makro. Pendapatan Per Kapita Kab. Temanggung Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2022

Tahun	PDRB Per KAPITA ADHB	
	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)
2017	24.775.416,01	6,24
2018	26.455.905,95	6,78
2019	28.052.969,06	6,04
2020	27.702.750,00	-1.21
2021	28.484.021,00	2,82
2022*	28.484.021,00	2,82

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

*) Data tahun 2022 masih sama dengan tahun 2021

Berdasarkan tabel Pendapatan Per Kapita diatas dapat dilihat bahwa nilai Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung selalu mengalami peningkatan, secara makro dapat diartikan bahwa kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung terus membaik, namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan sebenarnya karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/dinikmati oleh penduduk Kabupaten Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang dimiliki/dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung.

d. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah salah satu jenis pengangguran dimana tenaga kerja benar-benar tidak memiliki pekerjaan atau tenaga kerja tidak bekerja sama sekali. Biasanya pengangguran ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia atau karena adanya ketidaksesuaian antara lapangan kerja dengan keahlian tenaga kerja dan pendidikan. Permasalahan

paling pokok terletak pada kesempatan kerja, ketidakseimbangan antara peningkatan penduduk usia kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia akibat lemahnya penyerapan tenaga kerja. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung dari Tahun 2017-2022

TAHUN	TPT (%)	TPT JATENG	TPT NASIONAL
2017	2,97	4,57	5,50
2018	3,24	4,51	5,34
2019	2,99	4,49	5,28
2020	3,85	6,48	5,28
2021	2,62	5,95	6,49
2022*	2,54	5,95	6,49

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Dari tabel 2.6 diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung berfluktuasi dari tahun ke tahun, pada tahun 2017 tercatat sebesar 2,97 persen, pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 3,24, mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 2,99, pada tahun 2020 menjadi 3,85 dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 2,62. Seperti halnya di Kabupaten Temanggung, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk Jawa Tengah maupun nasional juga mengalami fluktuasi masing-masing di angka 5,95 dan 6,49. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2022 di angka 2,62%, artinya diantara 100 penduduk Temanggung yang masuk dalam usia angkatan kerja terdapat 3 orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Akan tetapi diluar jumlah penduduk usia kerja yang menganggur sama sekali masih banyak penduduk dalam usia kerja yang berstatus setengah pengangguran dan pengangguran terselubung, dimana pekerja yang bersangkutan

mempunyai pekerjaan tetapi belum optimal dilihat dari jam kerjanya yakni 35 jam dalam seminggu, serta seseorang bekerja belum sesuai dengan keahlian dan bakat yang dimiliki.

e. Persentase Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia menurut Kabupaten Kabupaten Temanggung

Pemerataan pendapatan merupakan salah satu tujuan utama dari pembangunan nasional. Semakin merata distribusi pendapatan masyarakat disuatu negara/daerah maka semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatan, hal ini mencerminkan bahwa kesejahteraan suatu masyarakat yang ada di negara/daerah tersebut merata.

Ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk (Bank Dunia). Untuk mengetahui distribusi pendapatan (ketimpangan pendapatan) suatu masyarakat dapat dihitung melalui perhitungan distribusi pengeluaran. Kriteria menurut Bank Dunia adalah sebagai berikut (dalam Susenas BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2020).

- 1) Ketimpangan pengeluaran tinggi (*high inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah kurang dari 12 persen;
- 2) Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah berada diantara 12 persen sampai dengan 17 persen; dan
- 3) Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah berada di atas 17 persen.

Tabel 2.9
Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank
Dunia di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	*2022
1	40% Bawah	16.56	18.34	18.39	17,54	18,78	18,78
2	40% Tengah	36.50	36.52	34.61	36,86	35,54	35,54
3	20% Atas	46.94	45.14	47.00	45,60	45,68	45,68

Sumber: Susenas BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2022

** Data tahun 2022 masih sama dengan tahun 2021*

Berdasarkan data pada tabel diatas, bisa dilihat bahwa menurut kriteria Bank Dunia, kelompok masyarakat berpendapatan rendah di tahun 2022 sudah bisa dikatakan meningkat kesejahteraannya ditandai dengan porsi pendapatan yang meningkat dari tahun 2020 menjadi sejumlah 18,78 persen, akan tetapi porsi pendapatan yang mereka terima masih jauh dibawah kelompok berpenghasilan menengah yang menerima sejumlah 35,54 persen dari total pendapatan penduduk secara keseluruhan, dan jauh dibawah kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi yang mendapatkan porsi 45,68 persen.

2. Indikator Sasaran Daerah

a. Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE. Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meliputi tiga domain yaitu Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, dan Layanan SPBE.

Indek SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja

yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk menilai:

- 1) *Domain Kebijakan Internal SPBE;*
- 2) *Domain Tata Kelola SPBE;*
- 3) *Domain Manajemen SPBE;*
- 4) *Domain Layanan SPBE.*

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangatbaik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Nilai Indeks SPBE Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel 2.11 sebagai berikut:

Tabel 2.11
Indeks SPBE Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	n.a	1,84	2,82	3,61	2,78	3,12

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung 2022

Evaluasi Mandiri SPBE Tahun 2022				
Indeks SPBE		3,12		
	Kebijakan SPBE	2,70		
	Tata Kelola SPBE	2,60		
	Manajemen SPBE	1,82		
	Layanan SPBE	4,00		
Domain/Aspek/ Indikator	Deskripsi	Indeks Akhir	Nilai Asal	Index
Domain 1	Kebijakan SPBE	2,70		2,70
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola	2,70		2,70
Domain 2	Tata Kelola SPBE	2,60		2,50
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE	0,90		0,9
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,20		1,20
Aspek 4	Penyelenggara SPBE	0,5		0,4
Domain 3	Manajemen SPBE	1,82		1,27
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE	1,27		0,73
Aspek 6	Pelaksanaan Audit TIK	0,55		0,55
Domain 4	Layanan SPBE	4,00		3,50
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,42		2,12
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	1,58		1,38
INDEKS SPBE		3,12		2,78

Gambar 2.1 Hasil Evaluasi Mandiri SPBE Tahun 2022

Nilai kematangan penyelenggaraan SPBE yang diperoleh Kabupaten Temanggung tentunya menjadikan penyelenggaraan SPBE masih perlu ditingkatkan dengan upaya perbaikan, baik didomain kebijakan SPBE, pelaksanaan tata kelola SPBE maupun layanan SPBE. Salah satu strateginya adalah dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan dikembangkan teknologi informasi sebagai dasar pelayanan kepada masyarakat, ruang komunikasi dengan masyarakat semakin terbuka dan mudah diakses, sehingga dapat meningkatkan nilai aparatur sipil negara, selain itu masyarakat dengan mudah dan cepat dapat memberikan masukan dan pengaduan.

Untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Temanggung akan diukur dengan beberapa parameter antara lain Indeks Pelaksanaan SPBE, indeks ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk menilai domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola SPBE, dan domain Layanan SPBE. Pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan metode:

- 1) Evaluasi dokumen, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan dokumen yang berisi jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
- 2) Wawancara, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan tanya jawab;
- 3) Observasi lapangan, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan pengamatan langsung.

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- 1) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- 2) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- 3) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Tahun 2022 Evaluasi dilakukan secara mandiri dengan cara upload data dukung pada aplikasi *monev.spbe.go.id.*, setelah data dukung di upload akan muncul nilai dari hasil evaluasi mandiri sesuai indikator yang sudah di penuhi.

Tabel 2.12
Domain, Aspek, dan Indikator Penilaian

Domain/ Aspek/ Indikator	Deskripsi	Bobot	Bobot Aspek
Domain 1	Kebijakan SPBE	13,00%	
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola	13%	100%
Indikator 1	Kebijakan internal arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30%	10%
Indikator 2	Kebijakan internal peta rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30%	10%
Indikator 3	Kebijakan internal manajemen data	1,30%	10%
Indikator 4	Kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE	1,30%	10%
Indikator 5	Kebijakan internal layanan Pusat Data	1,30%	10%
Indikator 6	Kebijakan internal layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30%	10%
Indikator 7	Kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30%	10%
Indikator 8	Kebijakan internal manajemen keamanan informasi	1,30%	10%
Indikator 9	Kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi	1,30%	10%
Indikator 10	Kebijakan internal tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30%	10%
Domain 2	Tata Kelola SPBE	25,00%	
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE	10,00%	40,00%
Indikator 11	Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50%	25%
Indikator 12	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50%	25%
Indikator 13	Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2,50%	25%
Indikator 14	Inovasi Proses Bisnis SPBE	2,50%	25%
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	10,00%	40,00%
Indikator 15	Pembangunan Aplikasi SPBE	2,50%	25%
Indikator 16	Layanan Pusat Data	2,50%	25%
Indikator 17	Layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50%	25%
Indikator 18	Penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50%	25%
Aspek 4	Penyelenggara SPBE	5,00%	20,00%
Indikator 19	Pelaksanaan tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50%	50%
Indikator 20	Kolaborasi penerapan SPBE	2,50%	50%
Domain 3	Manajemen SPBE	16,50%	
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE	12,00%	72,73%
Indikator 21	Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1,50%	13%
Indikator 22	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1,50%	13%
Indikator 23	Penerapan Manajemen Data	1,50%	13%
Indikator 24	Penerapan Manajemen Aset TIK	1,50%	13%
Indikator 25	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1,50%	13%
Indikator 26	Penerapan Manajemen Pengetahuan	1,50%	13%
Indikator 27	Penerapan Manajemen Perubahan	1,50%	13%
Indikator 28	Penerapan Manajemen Layanan Indikator SPBE	1,50%	13%
Aspek 6	Pelaksanaan Audit TIK	4,50%	27,27%
Indikator 29	Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1,50%	33%
Indikator 30	Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1,50%	33%
Indikator 31	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1,50%	33%
Domain 4	Layanan SPBE	45,50%	
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,50%	60,44%
Indikator 32	Layanan Perencanaan	2,75%	10%

Domain/ Aspek/ Indikator	Deskripsi	Bobot	Bobot Aspek
Indikator 33	Layanan Penganggaran	2,75%	10%
Indikator 34	Layanan Keuangan	2,75%	10%
Indikator 35	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	2,75%	10%
Indikator 36	Layanan Kepegawaian	2,75%	10%
Indikator 37	Layanan Kearsipan Dinamis	2,75%	10%
Indikator 38	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	2,75%	10%
Indikator 39	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2,75%	10%
Indikator 40	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	2,75%	10%
Indikator 41	Layanan Kinerja Pegawai	2,75%	10%
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	18,00%	39,56%
Indikator 42	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	3,00%	17%
Indikator 43	Layanan Data Terbuka	3,00%	17%
Indikator 44	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	3,00%	17%
Indikator 45	Layanan Publik Sektor 1 (Kependudukan)	3,00%	17%
Indikator 46	Layanan Publik Sektor 2 (Perizinan)	3,00%	17%
Indikator 47	Layanan Publik Sektor 3	3,00%	17%
INDEKS SPBE		100%	

b. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan keterbukaan dan pelayanan publik pada masyarakat salah satunya dapat diukur dari Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan pemeringkatan keterbukaan badan publik kabupaten/ kota terhadap implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Pemeringkatan keterbukaan badan publik adalah bagian dari evaluasi dan penilaian tahunan tata kelola informasi publik pada badan publik, terutama di lingkungan badan publik pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Fokus utama evaluasi dan penilaian badan publik dengan hasil akhir adalah kepatuhan badan publik menjalankan standar pelayanan informasi publik, terutama menyangkut keterbukaan program, kegiatan, kinerja dan anggaran.

Tahapan pemeringkatan keterbukaan badan publik adalah sebagai berikut:

1) Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri/SAQ (*Self Assesment Quessionaire*)

Tahapan awal adalah pengisian SAQ yang hasilnya dikategorikan sebagai berikut:

- Nilai SAQ 100 – 97, kategori informatif;
- Nilai SAQ 96 – 80, kategori menuju informatif;
- Nilai SAQ 79 – 60, kategori cukup informatif;
- Nilai SAQ 59 – 40, kategori kurang informatif;
- Nilai SAQ 39 – 0, kategori tidak informatif;

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah akan menetapkan 20 (dua puluh) badan publik dengan nilai terbaik untuk dilanjutkan dengan visitasi verifikasi.

2) Visitasi Verifikasi

Visitasi verifikasi dilakukan kepada 20 (dua puluh) badan publik dengan nilai SAQ tertinggi. Dalam visitasi dilakukan verifikasi atas jawaban SAQ dengan memeriksa seluruh item jawaban dengan data dukung yang tersedia.

3) Uji Publik

Badan Publik nominatif akan di undang untuk uji publik melalui kegiatan presentasi di hadapan tim penilai. Presentasi akan melakukan penilaian terhadap kebijakan komitmen, program, dan kegiatan Badan Publik dalam hal mewujudkan keterbukaan Badan Publik serta inovasi-inovasi layanan publik berbasis keterbukaan informasi.

4) Penilaian Akhir

Penilaian akhir dilakukan oleh tim penilai bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

untuk menetapkan badan publik yang memiliki tata kelola informasi publik terbaik berdasarkan akumulasi peringkat nilai. Dasar perhitungan peringkat adalah:

- Hasil evaluasi penilaian *website*;
- Hasil penilaian SAQ hasil verifikasi;
- Uji publik.

Tabel 2.13
 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten
 Temanggung Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	70,8	77,9	80,03	95,5	89,56	88,33
2	Kategori	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Berdasarkan Tabel 2.13 dapat dilihat bahwa selama kurun waktu enam tahun (2017 sd 2022) pelaksanaan pemeringkatan keterbukaan badan publik, nilai PPID Kabupaten Temanggung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2022 nilai KIP mengalami penurunan secara angka dari nilai 89,56 di tahun 2021 menjadi 88,33 di tahun 2022. Namun demikian masih masuk dalam kategori Menuju Informatif.

Penurunan angka tersebut tidak mencerminkan menurunnya kualitas implemantasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemkab Temanggung, dikarenakan untuk mencapai kategori Informatif hanya kurang 1,67 point.

Capaian tersebut dikarenakan oleh upaya dan kerja keras dari seluruh pemangku keterbukaan informasi publik di Pemkab Temanggung, baik PPID Utama, PPID Pembantu dan semua *stakeholder*.

Upaya tersebut antara lain dengan penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM)

pelaksana PPID, pengesahan regulasi dan SOP, pendampingan, monitoring dan evaluasi rutin PPID Pembantu, pengembangan website dan dashboard PPID serta peningkatan layanan kepada masyarakat.

Gambar berikut ini merupakan piagam penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2022.

Tabel 2.14
Nilai Pemingkatan Badan Publik Tahun 2022



Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

3. Indikator Program Bidang Komunikasi dan Informatika
 - a. Persentase PPID badan publik yang aktif

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID, maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

PPID badan publik yang aktif yaitu PPID Pembantu Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang sesuai penilaian PPID Utama telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PPID Pembantu Badan Publik adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan tugas dan kewenangannya dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Mengklasifikasikan informasi, meliputi:
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- 3) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
- 4) Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
- 5) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- 6) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk akses oleh masyarakat;
- 7) Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
- 8) Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

Yang dimaksud PPID aktif dalam hal ini adalah PPID Pembantu Badan Publik yang melaksanakan tugas dan kewenangannya secara sungguh-sungguh dengan indikator penilaian sebagai berikut:

- Mengumumkan Informasi Publik;
- Menyediakan Informasi Publik;

- Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
- Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Rumus memperoleh angka persentase PPID badan publik yang aktif yaitu Jumlah PPID aktif dibagi total badan publik dikali 100 %. Penilaian PPID Badan Publik yang aktif baru dilaksanakan mulai tahun 2017.

Realisasi persentase PPID badan publik yang aktif Kabupaten Temanggung tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Persentase PPID Pembantu Badan Publik Aktif
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PPID badan publik yang aktif	5	26	38	45	50	62
2	Jumlah PPID badan publik	335	335	335	341	341	341
3	Persentase PPID badan publik yang aktif	1,4 %	7,3 %	11,34 %	13,20 %	14,66 %	18,18 %

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2022

Berdasarkan Tabel 2.15 dapat dilihat bahwa persentase PPID badan publik yang aktif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan, namun demikian masih terbilang kecil.

Faktor pendorong capaian Jumlah PPID badan publik yang aktif adalah keaktifan dari PPID utama Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan pendampingan, pembinaan dan jemput bola kepada PPID pelaksana dilingkungan Pemkab Temanggung. Dalam hal pendampingan diwujudkan dengan monev rutin terkait kelengkapan kelembagaan dan data PPID pelaksana yang dilaksanakan tiap triwulan. Pembinaan dilaksanakan dengan kegiatan peningkatan kapasitas pengelola PPID Pelaksana, meliputi bimtek, workshop, dan pelatihan.

Mulai tahun 2021 terdapat inovasi Sistem Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (SIMONEV KIP) yang merupakan aplikasi untuk membantu memonitor capaian updating data dan informasi oleh PPID Pelaksana. SIMONEV KIP juga menjadi solusi atas permasalahan seringnya mutasi/perpindahan tugas admin PPID Pelaksana.

Sedangkan faktor penghambat adalah masih belum kuatnya kesadaran di tingkat PPID Pembantu Badan Publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, juga kendala keterbatasan kompetensi SDM pelaku PPID. Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian prosentase keaktifan ini adalah sejalan dengan upaya untuk meningkatkan nilai keterbukaan Informasi Publik, yaitu dengan penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pelaksana PPID, pengesahan regulasi dan SOP, pendampingan, monitoring dan evaluasi rutin PPID Pembantu, pengembangan website dan dashboard PPID serta peningkatan layanan kepada masyarakat.

No.	Nama BPD	Status Keterbukaan	PPID Organisasi			Ingen dan Kegiatan					Indikator Kinerja										
			Man	Kelemb	Prosedur	SIAP	SIK	SIK	SIK	SIK	SIK	SIK	SIK	SIK	SIK	SIK					
1	Pemerintah Kabupaten Temanggung	Terbuka	✓	✓	✓	2023-03-01															
2	Pemerintah Kabupaten Temanggung	Terbuka	✓	✓	✓	2023-03-01															
3	Pemerintah Kabupaten Temanggung	Terbuka	✓	✓	✓	2023-03-01															
4	Pemerintah Kabupaten Temanggung	Terbuka	✓	✓	✓	2023-03-01															
5	Pemerintah Kabupaten Temanggung	Terbuka	✓	✓	✓	2023-03-01															

Gambar 2.3
Tampilan Layar Aplikasi SIMONEV KIP

Tabel 2.16 memperlihatkan keaktifan PPID Pembantu Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2017 sd. 2022

Tabel 2.16
Keaktifan PPID Pembantu Badan Publik
Pemerintah Kabupaten Temanggung

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sekretaris DPRD	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
2	Dinas Kesehatan	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
3	Dinas Pendidikan	-	-	-	Aktif	Aktif	Aktif
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
5	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
6	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
8	Dinas Pertanian Dan Pangan	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
10	Dinas Tenaga Kerja	-	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
11	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Perhubungan	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
13	Dinas Perikanan Dan Peternakan	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	(bergabung dg Dinas Pertanian)
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
17	Dinas Lingkungan Hidup	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
18	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
19	Dinas Satuan Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
20	Inspektorat	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
21	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Akti f	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
23	Badan Kepegawaian Pengembangan Daerah	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
24	Rumah Sakit Umum Kab. Temanggung	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
26	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	-	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
27	Kecamatan Temanggung	-	-	-	-	-	Aktif
28	Kecamatan Tembarak	-	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
29	Kecamatan Pringsurat	-	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
30	Kecamatan Kaloran	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
31	Kecamatan Kranggan	-	-	-	-	-	Aktif
32	Kecamatan Parakan	-	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
33	Kecamatan Kedu	-	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
34	Kecamatan Bulu	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
35	Kecamatan Kandangan	-	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
36	Kecamatan Candiroto	-	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
37	Kecamatan Jumo	-	-	-	-	Aktif	Aktif
38	Kecamatan Wonobojo	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
39	Kecamatan Ngadirejo	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
40	Kecamatan Bejen	-	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
41	Kecamatan Tretep	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
42	Kecamatan Kledung	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
43	Kecamatan Selopampang	-	-	-	-	Aktif	Aktif
44	Kecamatan Tlogomulyo	-	-	Aktif	Aktif	Aktif	-
45	Kecamatan Gemawang	-	-	-	-	Aktif	Aktif
46	Kecamatan Bansari	-	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
47	Kelurahan Temanggung I	-	-	-	-	-	-
48	Kelurahan Temanggung II	-	-	-	-	-	-
49	Kelurahan Butuh	-	-	-	-	-	-
50	Kelurahan Jampiroso	-	-	-	-	-	-
51	Kelurahan Jampirejo	-	-	-	-	-	-
52	Kelurahan Kertosari	-	-	-	-	-	-
53	Kelurahan Banyuurip	-	-	-	-	-	-

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun					2022
		2017	2018	2019	2020	2021	
54	Kelurahan Kowangan	-	-	-	-	-	-
55	Kelurahan Jurang	-	-	-	-	-	-
56	Kelurahan Sidorejo	-	-	-	-	-	-
57	Kelurahan Walitelon utara	-	-	-	-	-	-
58	Kelurahan Walitelon selatan	-	-	-	-	-	-
59	Kelurahan Tlogorejo	-	-	-	-	-	-
60	Kelurahan Manding	-	-	-	-	-	-
61	Kelurahan Kebonsari	-	-	-	-	-	-
62	Kelurahan Mungseng	-	-	-	-	-	-
63	Kelurahan Purworejo	-	-	-	-	-	-
64	Kelurahan Giyanti	-	-	-	-	-	-
65	Kelurahan Madureso	-	-	-	-	-	-
66	Kelurahan Kranggan	-	-	-	-	-	-
67	Kelurahan Parakan wetan	-	-	-	-	-	-
68	Kelurahan Parakan kauman	-	-	-	-	-	-
69	Kelurahan Manggong	-	-	-	-	-	-
70	Desa Joho	-	-	-	Aktif	Aktif	Aktif
71	Desa Guntur	-	-	-	-	-	-
72	Desa Lungge	-	-	-	Aktif	Aktif	Aktif
73	Desa Mudal	-	-	-	-	-	-
74	Desa Gilingsari	-	-	-	-	-	-
75	Desa Nampirejo	-	-	-	-	-	-
76	Desa Tlogomulyo	-	-	-	-	-	-
77	Desa Candisari	-	-	-	-	-	-
78	Desa Sriwungu	-	-	-	-	-	-
79	Desa Langgeng	-	-	-	-	-	-
80	Desa Tanjungsari	-	-	-	-	-	-
81	Desa Losari	-	-	-	-	-	-
82	Desa Balerejo	-	-	-	-	-	-
83	Desa Kerokan	-	-	-	-	-	-
84	Desa Legoksari	-	-	-	-	-	-
85	Desa Tilir	-	-	-	-	-	-
86	Desa Gedegan	-	-	-	-	-	-
87	Desa Pagersari	-	-	-	-	-	-
88	Desa Badran	-	-	-	-	-	-
89	Desa Bengkal	-	-	-	-	-	Aktif
90	Desa Pare	-	-	-	-	-	-
91	Desa Nguwet	-	-	-	-	-	-
92	Desa Ngropoh	-	-	-	-	-	-
93	Desa Pendowo	-	-	-	-	-	-
94	Desa Sanggrahan	-	-	-	-	-	-
95	Desa Klepu	-	-	-	-	-	-
96	Desa Kemloko	-	-	-	-	-	-
97	Desa Gentan	-	-	-	-	-	-
98	Desa Kramat	-	-	-	-	-	-
99	Desa Purwosari	-	-	-	-	-	Aktif
100	Desa Tembarak	-	-	-	-	-	-
101	Desa Menggoro	-	-	-	-	-	-

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun					2022
		2017	2018	2019	2020	2021	
102	Desa Purwodadi	-	-	-	-	-	-
103	Desa Wonokerso	-	-	-	-	-	-
104	Desa Kemloko	-	-	-	-	-	-
105	Desa Gandu	-	-	-	-	-	-
106	Desa Botoputih	-	-	-	-	-	-
107	Desa Tawangsari	-	-	-	-	-	-
108	Desa Greges	-	-	-	-	-	-
109	Desa Krajan	-	-	-	-	-	-
110	Desa Jragan	-	-	-	-	-	-
111	Desa Drono	-	-	-	-	-	-
112	Desa Banaran	-	-	-	-	-	-
113	Desa Selopampang	-	-	-	-	-	-
114	Desa Tanggulanom	-	-	-	-	-	-
115	Desa Jetis	-	-	-	-	-	-
116	Desa Salamrejo	-	-	-	-	-	-
117	Desa Ngaditirto	-	-	-	-	-	-
118	Desa Bulan	-	-	-	-	-	-
119	Desa Kacepit	-	-	-	-	-	-
120	Desa Gambasan	-	-	-	-	-	-
121	Desa Bumiayu	-	-	-	-	-	-
122	Desa Kebonagung	-	-	-	-	-	-
123	Desa Bagus	-	-	-	-	-	-
124	Desa Plumbon	-	-	-	-	-	-
125	Desa Pringsurat	-	-	-	-	-	Aktif
126	Desa Kebumen	-	-	-	-	-	-
127	Desa Soropadan	-	-	-	-	-	-
128	Desa Kopen	-	-	-	Aktif	Aktif	Aktif
129	Desa Karangwuni	-	-	-	-	-	-
130	Desa Gowak	-	-	-	-	-	-
131	Desa Rejosari	-	-	-	-	-	-
132	Desa Pingit	-	-	-	-	-	-
133	Desa Klepu	-	-	-	-	-	-
134	Desa Soborejo	-	-	-	-	-	-
135	Desa Nglorok	-	-	-	-	-	-
136	Desa Pagergunung	-	-	-	-	-	Aktif
137	Desa Wonokerso	-	-	-	-	-	-
138	Desa Ngipik	-	-	-	-	-	Aktif
139	Desa Kaloran	-	-	-	-	-	-
140	Desa Tlogowungu	-	-	-	Aktif	Aktif	Aktif
141	Desa Gandon	-	-	-	-	-	Aktif
142	Desa Tleter	-	-	-	-	-	-
143	Desa Getas	-	-	-	-	-	-
144	Desa Kalimanggis	-	-	-	-	-	-
145	Desa Tempuran	-	-	-	-	-	-
146	Desa Kemiri	-	-	-	-	-	-
147	Desa Geblog	-	-	-	-	-	-
148	Desa Tegowanuh	-	-	-	-	-	-
149	Desa Keblukan	-	-	-	-	-	-
150	Desa Tepusen	-	-	-	-	-	-
151	Desa Gandulan	-	-	-	-	-	-

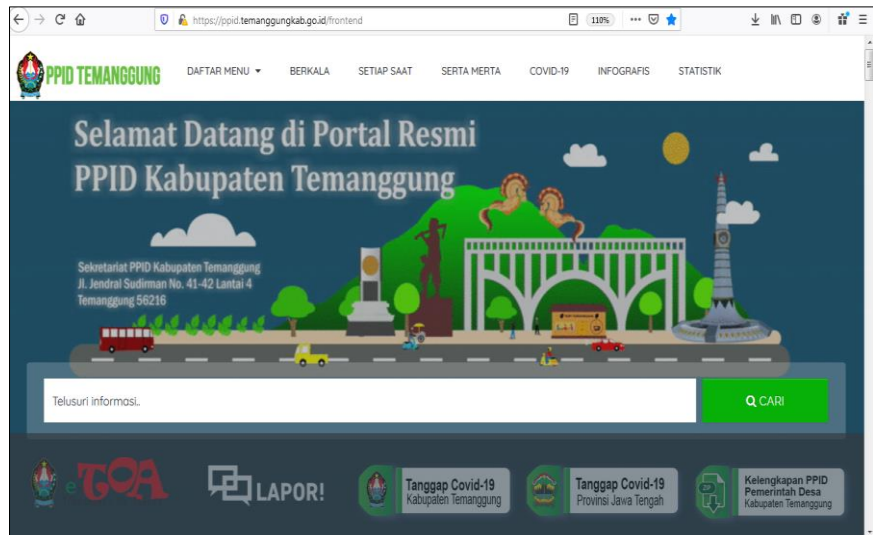
No	Nama Badan Publik	Status pada tahun					2022
		2017	2018	2019	2020	2021	
152	Desa Kwarakan	-	-	-	-	-	-
153	Desa Campursalam	-	-	-	-	-	-
154	Desa Wanutengah	-	-	-	-	-	-
155	Desa Nglondong	-	-	-	-	-	Aktif
156	Desa Bagusari	-	-	-	-	-	-
157	Desa Dangkel	-	-	-	-	-	-
158	Desa Mandisari	-	-	-	-	-	-
159	Desa Tegalroso	-	-	-	-	-	-
160	Desa Traji	-	-	-	-	-	-
161	Desa Watukumpul	-	-	-	-	-	-
162	Desa Ringinanom	-	-	-	-	-	-
163	Desa Depakharjo	-	-	-	-	-	-
164	Desa Caturanom	-	-	-	-	-	-
165	Desa Gelapansari	-	-	-	-	-	-
166	Desa Sungginsari	-	-	-	-	-	-
167	Desa Bansari	-	-	-	-	-	-
168	Desa Mojosari	-	-	-	-	-	-
169	Desa Rejosari	-	-	-	-	-	-
170	Desa Gunungsari	-	-	-	-	-	-
171	Desa Balesari	-	-	-	-	-	-
172	Desa Purborejo	-	-	-	-	-	-
173	Desa Tlogowero	-	-	-	-	-	-
174	Desa Mranggen Kidul	-	-	-	-	-	-
175	Desa Mranggen Tengah	-	-	-	-	-	-
176	Desa Candisari	-	-	-	-	-	-
177	Desa Campuranom	-	-	-	-	-	-
178	Desa Gentingsari	-	-	-	-	-	-
179	Desa Tanurejo	-	-	-	-	-	-
180	Desa Kledung	-	-	-	-	-	-
181	Desa Kalirejo	-	-	-	-	-	-
182	Desa Paponan	-	-	-	-	-	-
183	Desa Jeketro	-	-	-	-	-	-
184	Desa Kwadungan Gunung	-	-	-	-	-	-
185	Desa Kwadungan Jurang	-	-	-	-	-	-
186	Desa Tlahap	-	-	-	-	-	-
187	Desa Petarangan	-	-	-	-	-	-
188	Desa Canggal	-	-	-	-	-	-
189	Desa Jambu	-	-	-	-	-	-
190	Desa Kruwisan	-	-	-	-	-	-
191	Desa Tuksari	-	-	-	-	-	-
192	Desa Kedu	-	-	-	-	-	-
193	Desa Candimulyo	-	-	-	-	-	-
194	Desa Salamsari	-	-	-	-	-	-
195	Desa Danurejo	-	-	-	-	-	-
196	Desa Mojutengah	-	-	-	-	-	-
197	Desa Karangtejo	-	-	-	-	-	-
198	Desa Mergowati	-	-	-	-	-	-
199	Desa Kutoanyar	-	-	-	-	-	-
200	Desa Kundisari	-	-	-	-	-	-

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
201	Desa Ngadimulyo	-	-	-	-	-	-
202	Desa Gondangwayang	-	-	-	-	-	-
203	Desa Bandunggede	-	-	-	-	-	-
204	Desa Tegalsari	-	-	-	-	-	-
205	Desa Bojonegoro	-	-	-	-	-	-
206	Desa Bulu	-	-	-	-	-	-
207	Desa Tegalurung	-	-	-	-	-	-
208	Desa Campursari	-	-	-	-	-	-
209	Desa Gandurejo	-	-	-	-	-	-
210	Desa Gondosuli	-	-	-	-	-	-
211	Desa Ngimbrang	-	-	-	-	-	-
212	Desa Putat	-	-	-	-	-	-
213	Desa Danupayan	-	-	-	-	-	-
214	Desa Mondoretno	-	-	-	-	-	-
215	Desa Pandemulyo	-	-	-	Aktif	Aktif	Aktif
216	Desa Pasuruhan	-	-	-	-	-	-
217	Desa Pakurejo	-	-	-	-	-	-
218	Desa Tegalrejo	-	-	-	-	-	-
219	Desa Malang Sari	-	-	-	-	-	-
220	Desa Pagergunung	-	-	-	-	-	-
221	Desa Wonosari	-	-	-	-	-	-
222	Desa Bansari	-	-	-	-	-	-
223	Desa Wonotirto	-	-	-	-	-	-
224	Desa Pengilon	-	-	-	-	-	-
225	Desa Kandangan	-	-	-	-	-	-
226	Desa Baledu	-	-	-	-	-	-
227	Desa Caruban	-	-	-	-	-	-
228	Desa Wadas	-	-	-	-	-	-
229	Desa Samiran	-	-	-	-	-	-
230	Desa Ngemplak	-	-	-	Aktif	Aktif	-
231	Desa Kembang Sari	-	-	-	-	-	-
232	Desa Gesing	-	-	-	-	-	-
233	Desa Margolelo	-	-	-	-	-	-
234	Desa Blimbing	-	-	-	-	-	-
235	Desa Kedungumpul	-	-	-	-	-	-
236	Desa Rowo	-	-	-	-	-	-
237	Desa Malebo	-	-	-	-	-	-
238	Desa Tlogopucang	-	-	-	-	-	-
239	Desa Kedawung	-	-	-	-	-	-
240	Desa Banjarsari	-	-	-	-	-	-
241	Desa Candiroto	-	-	-	-	-	-
242	Desa Lampuyang	-	-	-	-	-	-
243	Desa Canggal	-	-	-	-	-	-
244	Desa Kenteng Sari	-	-	-	-	-	-
245	Desa Ngabeyan	-	-	-	-	-	-
246	Desa Bantir	-	-	-	-	-	-
247	Desa Krawitan	-	-	-	-	-	-
248	Desa Muntung	-	-	-	-	-	-
249	Desa Batusari	-	-	-	-	-	-

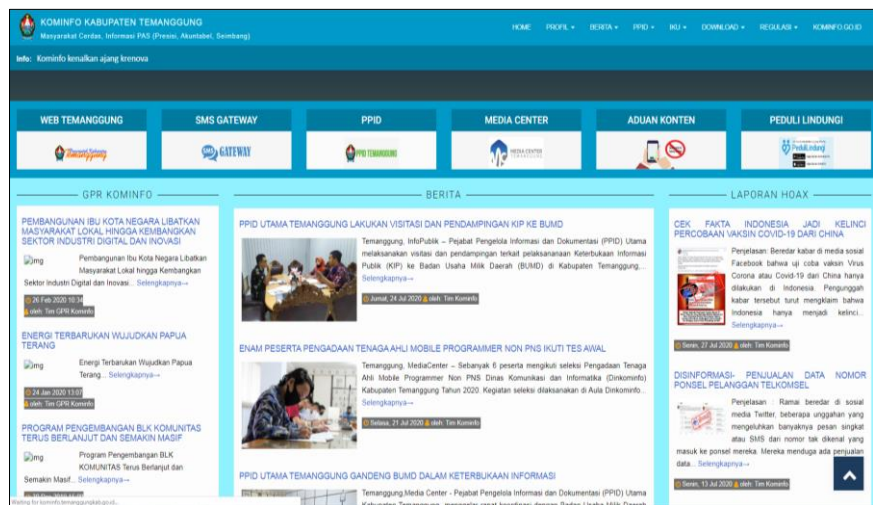
No	Nama Badan Publik	Status pada tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
250	Desa Mento	-	-	-	-	-	-
251	Desa Muneng	-	-	-	-	-	-
252	Desa Plosogaden	-	-	-	-	-	-
253	Desa Sidoharjo	-	-	-	-	-	-
254	Desa Gunungpayung	-	-	-	-	-	-
255	Desa Bejen	-	-	-	-	-	-
256	Desa Banjarsari	-	-	-	-	-	-
257	Desa Jlegong	-	-	-	-	-	-
258	Desa Prangkokan	-	-	-	-	-	-
259	Desa Lowungu	-	-	-	-	-	-
260	Desa Larangan Luwok	-	-	-	-	-	-
261	Desa Congkrang	-	-	-	-	-	-
262	Desa Kebondalem	-	-	-	-	-	-
263	Desa Kemuning	-	-	-	-	-	-
264	Desa Selosabrang	-	-	-	-	-	-
265	Desa Tanjungsari	-	-	-	-	-	-
266	Desa Petung	-	-	-	-	-	-
267	Desa Duren	-	-	-	-	-	-
268	Desa Ngaliyan	-	-	-	-	-	-
269	Desa Jumo	-	-	-	-	-	-
270	Desa Jamusan	-	-	-	-	-	-
271	Desa Kertosari	-	-	-	-	-	-
272	Desa Giyono	-	-	-	-	-	-
273	Desa Gununggempol	-	-	-	-	-	-
274	Desa Padureso	-	-	-	-	-	-
275	Desa Barang	-	-	-	-	-	-
276	Desa Jombor	-	-	-	-	-	-
277	Desa Ketitang	-	-	-	-	-	-
278	Desa Morobongo	-	-	-	-	-	-
279	Desa Karangtejo	-	-	-	-	-	-
280	Desa Sukomarto	-	-	-	-	-	-
281	Desa Gedongsari	-	-	-	-	-	-
282	Desa Gemawang	-	-	-	-	-	-
283	Desa Muncar	-	-	-	-	-	-
284	Desa Kemiriombo	-	-	-	-	-	-
285	Desa Ngadisepi	-	-	-	-	-	-
286	Desa Krempong	-	-	-	-	-	-
287	Desa Sucen	-	-	-	-	-	-
288	Desa Karangseneng	-	-	-	-	-	-
289	Desa Banaran	-	-	-	-	-	-
290	Desa Kalibanger	-	-	-	-	-	-
291	Desa Jambon	-	-	-	-	-	-
292	Desa Tretep	-	-	-	-	-	-
293	Desa Donorojo	-	-	-	-	-	-
294	Desa Nglarangan	-	-	-	-	-	-
295	Desa Sigedong	-	-	-	-	-	-
296	Desa Bonjor	-	-	-	-	-	-
297	Desa Tempelsari	-	-	-	-	-	-
298	Desa Campurejo	-	-	-	-	-	-
299	Desa Bojong	-	-	-	-	-	-
300	Desa Bandungan	-	-	-	-	-	-

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun					2022
		2017	2018	2019	2020	2021	
301	Desa Simpar	-	-	-	-	-	-
302	Desa Tlogo	-	-	-	-	-	-
303	Desa Wonoboyo	-	-	-	-	-	-
304	Desa Pateken	-	-	-	-	-	-
305	Desa Pitrosari	-	-	-	-	-	-
306	Desa Purwosari	-	-	-	-	-	-
307	Desa Kebonsari	-	-	-	-	-	-
308	Desa Semen	-	-	-	-	-	-
309	Desa Tening	-	-	-	-	-	-
310	Desa Wonocoyo	-	-	-	-	-	-
311	Desa Pesantren	-	-	-	-	-	-
312	Desa Rejosari	-	-	-	-	-	-
313	Desa Tawangsari	-	-	-	-	-	-
314	Desa Wates	-	-	-	-	-	-
315	Desa Cemoro	-	-	-	-	-	-
316	Desa Ngadirejo	-	-	-	-	-	-
317	Desa Gondang Winangun	-	-	-	-	-	-
318	Desa Ganduwetan	-	-	-	-	-	-
319	Desa Ngaren	-	-	-	-	-	-
320	Desa Mangunsari	-	-	-	-	-	-
321	Desa Dlimoyo	-	-	-	-	-	-
322	Desa Purbosari	-	-	-	-	-	-
323	Desa Campursari	-	-	-	-	-	-
324	Desa Tegalrejo	-	-	-	-	-	-
325	Desa Giripurno	-	-	-	-	-	-
326	Desa Katekan	-	-	-	-	-	-
327	Desa Banjarsari	-	-	-	-	-	-
328	Desa Medari	-	-	-	-	-	-
329	Desa Karanggedong	-	-	-	-	-	-
330	Desa Munggangsari	-	-	-	-	-	-
331	Desa Kataan	-	-	-	-	-	-
332	Desa Petirejo	-	-	-	-	-	-
333	Desa Pringapus	-	-	-	-	-	-
334	Desa Gejagan	-	-	-	-	-	-
335	Desa Batursari	-	-	-	-	-	-
336	PDAM Tirta Agung	-	-	-	-	Aktif	Aktif
337	PD BPR Bank Pasar	-	-	-	-	-	Aktif
338	PD Apotik Waringin Mulyo	-	-	-	-	-	-
339	PD BPR BKK Temanggung	-	-	-	-	Aktif	Aktif
340	PD Aneka Usaha	-	-	-	-	-	Aktif
341	PD Bhumi Phala Wisata	-	-	-	-	-	-
Jumlah PPID Aktif		5	26	38	45	50	62

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2022



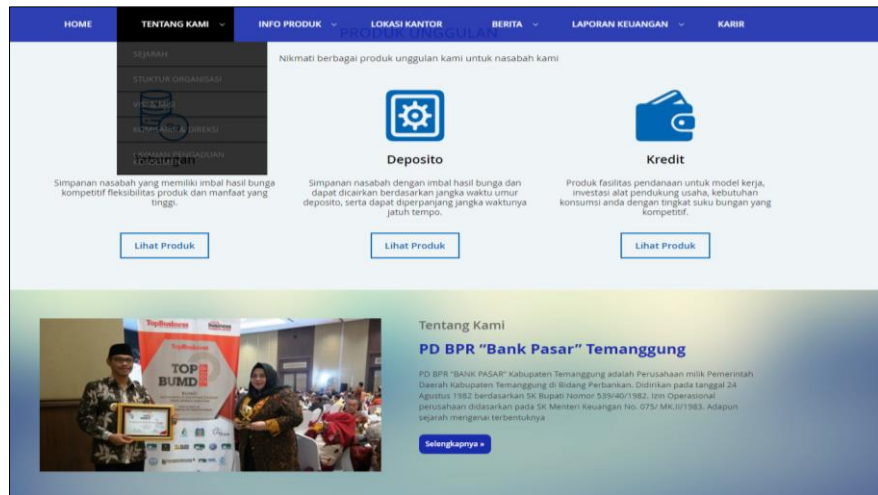
Gambar 2.3
Website PPID Kabupaten Temanggung



Gambar 2.4
Website PPID Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah/Kecamatan



Gambar 2.5
Website PPID Badan Publik Kelurahan/Desa



Gambar 2.6

Website PPID Badan Publik Badan Usaha Milik Daerah

b. Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang Aktif

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat secara khusus sebagai partner pemerintah dalam melaksanakan diseminasi informasi kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan peran serta diseminasi kepada masyarakat KIM berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

Indikator keaktifan KIM adalah melaksanakan kegiatan rutin dalam peningkatan literasi media masyarakat, diseminasi informasi dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat atau dijabarkan sebagai berikut:

- Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
- Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
- Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya dalam rangka mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.

Untuk memperoleh angka persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif dapat menggunakan rumus jumlah KIM yang aktif/jumlah KIM yang terbentuk x 100%.

Realisasi persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.17 berikut.

Tabel 2.17
Persentase KIM Aktif Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang aktif	1	2	5	5	7	9
2	Jumlah kelompok informasi masyarakat	19	32	32	32	32	32
3	Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	3,2%	6,25 %	15,63 %	15,63 %	21,88 %	28,13 %

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2022

Berdasarkan Tabel 2.14 dapat dilihat bahwa Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan. Pada triwulan 4 tahun 2022 tercatat ada 9 KIM aktif dari 32 KIM yang ada di Kabupaten Temanggung. Capaian indikator kinerja Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif adalah 28,13% atau 100% dari target yang ditetapkan di tahun 2022.

Faktor pendorong capaian indikator tersebut diantaranya adalah semangat masyarakat dalam turut serta mendesiminasikan dan meningkatkan literasi informasi. Kelompok Informasi Masyarakat berperan aktif dalam menjalankan tugas sebagai kelompok yang mempunyai peran sebagai fasilitator, mitra Pemerintah Daerah juga sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat, sebagai pelancar arus informasi serta sebagai terminal informasi bagi masyarakat desa, meskipun kegiatan tersebut belum semuanya terdokumentasi dengan rapi.

Tabel 2.18
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kab.
Temanggung

No.	Nama KIM	Alamat	Tahun Pembentukan	status	
				Aktif	Tidak Aktif
1	Kayana	Desa Danupayan Kec. Bulu	2017	✓	
2	Tergalurung	Desa Tegalurung Kec. Bulu	2017		✓
3	Almond	Desa Mondoretno Kec. Bulu	2017	✓	
4	Sari Makmur	Desa Campursari, Kec. Bulu	2017		✓
5	Sebid	Desa Putat, Kec. Bulu	2017		✓
6	Bansari	Desa Bansari Kec. Bulu	2017		✓
7	Pandemulyo	Desa Pandemulyo Kec. Bulu	2017	✓	
8	Ngudi Sari	Desa Malangsari Kec. Bulu	2017		✓

No.	Nama KIM	Alamat	Tahun Pembentukan	status	
				Aktif	Tidak Aktif
9	Pengilon	Desa Pengilon Kec. Bulu	2017	✓	
10	Loh Jinawi	Desa Gandurejo Kec. Bulu	2017		✓
11	Prasasti	Desa Gondosuli Kec. Bulu	2017		✓
12	Cinta Ngimbrang	Desa Ngimbrang Kec. Bulu	2017		✓
13	Madani	Desa Pagergunung Kec. Bulu	2017		✓
14	KIM Pakurejo	Desa Pakurejo Kec. Bulu	2017		✓
15	De Pasthi	Desa Pasuruhan Kec. Bulu	2017		✓
16	KIM Tegalrejo	Desa Tegalrejo Kec. Bulu	2017		✓
17	Tirto Meteor	Desa Wonotirto Kec. Bulu	2017		✓
18	Wonosari	Desa Wonosari Kec. Bulu	2017		✓
19	Bulu Jaya	Desa Bulu Kec. Bulu	2017	✓	
20	Maju Makmur	Desa Karangtejo Kec. Jumo	2018		✓
21	Bersama	Desa Jombor Kec. Jumo	2018		✓
22	Jaya Utama	Desa Jamusan Kec. Jumo	2018	✓	
23	Tentrem	Desa Sukomarto Kec. Jumo	2018		✓
24	Legowo	Desa Giyono Kec. Jumo	2018	✓	
25	Podo Maju	Desa Morobongo Kec. Jumo	2018		✓
26	Taruna Bhakti	Desa Barang Kec. Jumo	2018		✓
27	Manggala	Desa Gununggempol Kec. Jumo	2018	✓	
28	Berlian	Desa Padureso Kec. Jumo	2018		✓
29	Lancar Jaya	Desa Kertosari Kec. Jumo	2018		✓
30	Damai Sejahtera	Desa Ketitang Kec. Jumo	2018		✓
31	Sido Dadi	Desa Gedongsari Kec. Jumo	2018		✓
32	Adipati Sindurejo	Desa Jumo Kec. Jumo	2018	✓	
Jumlah				9	23

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2022



Gambar 2.7
Media Komunikasi KIM Tingkat Desa

c. Persentase Kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Terhadap Norma Siaran

LP (Lembaga Penyiaran) terdiri dari Lembaga Penyiaran Publik (LPP) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) adalah lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran radio atau televisi, yang memberikan pengakuan secara signifikan terhadap peran supervisi dan evaluasi oleh anggota komunitasnya, melalui sebuah lembaga supervisi yang khusus didirikan untuk tujuan tersebut.

Kepatuhan Lembaga Penyiaran terhadap norma siaran adalah pelaksanaan regulasi tentang penyiaran dan norma siaran oleh lembaga penyiaran, baik publik, swasta maupun komunitas di Kabupaten Temanggung. Regulasi penyiaran yang dimaksud yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Pedoman Program Penyiaran (P3) dan SPS (Standar Program Siaran), serta aturan terkait penyiaran yang ditetapkan oleh lembaga penyiaran, baik Kominfo, Balai Monitoring (Balmon) dan Komisi Penyiaran. Norma Siaran mengacu pada:

- Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.
- Standar Program Siaran (SPS) adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan,

pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Dan Standar Program Siaran (SPS) merupakan penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran.

Persentase kepatuhan lembaga penyiaran terhadap norma siaran diukur dengan jumlah aduan/jumlah pelanggaran yang dapat ditangani dan kemudian ditindaklanjuti. Adapun rumus yang digunakan adalah: jumlah aduan tertangani dibagi jumlah aduan dikali 100%. Apabila dalam tahun tertentu tidak ada aduan, maka capaiannya dianggap 100%.

Realisasi Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran di Kabupaten Temanggung tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19
Persentase Kepatuhan LPP Terhadap Norma Siaran
Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang patuh	8	8	8	8	8	8
2	Jumlah Lembaga Penyiaran Publik (LPP)	8	8	8	8	8	8
3	Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2022

Dari Tabel 2.19 dapat dilihat bahwa persentase kepatuhan LPP terhadap norma siaran selalu 100%.

Di wilayah Kabupaten Temanggung terdapat total 8 Lembaga Penyiaran Publik, terdiri dari 5 Radio Swasta, 1 Radio Komunitas, 1 Radio Publik Lokal, 1 Televisi Publik Lokal yang secara lengkap disajikan pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20
LPP di Kabupaten Temanggung

NO	NAMA LPP	ALAMAT	FREK
1	Radio Erte FM	Jl. Gerilya Kowangan, Temanggung	94.8 Mhz
2	Radio Angkasa 7	JL. Gilingsari Kav. 2-3 Tegaltemu Manding, Temanggung	88.1 Mhz
3	Radio O2	Jl. Jenderal Sudirman No.164, Rejosari, Kowangan, Temanggung	98.1 MHz
4	Radio Ofa	Komplek Wisma Soemodilogo, Kranggan, Temanggung	101.5 MHz
5	Radio Best/Pop FM	Jl. Randusari No. 5 Temanggung	103.1 MHz
6	Radio Shofar	Jl. Soepono No. 11 Temanggung	107.7 MHz
7	Radio Shantika	Jl. Jenderal Sudirman No. 60, Jampirejo barat, Jampirejo, Temanggung	96.4 FM
8	Temanggung TV	Jl. S. Kadar Maron No.21, Sawah & Hutan, Kedungumpul, Kandangan, Temanggung	3970.8/H/ 03000

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2022

Dalam rangka pengawasan isi siaran masyarakat dapat melaksanakan secara langsung dan melaporkan kepada Dinkominfo atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah. Untuk menguatkan peran pengawasan isi siaran ini, KPID Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinkominfo membentuk kelompok masyarakat pemantau isi siaran dengan beranggotakan organisasi masyarakat, unsur mahasiswa dan birokrasi.

Tingkat kepatuhan lembaga penyiaran terhadap norma siaran di Kabupaten Temanggung tergolong baik, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat berat dan serius, apabila ada hanya pelanggaran yang bersifat

ringan terkait konten siaran yang langsung ditindaklanjuti oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan.

d. Persentase Ketersediaan Akses Internet Publik

Ruang publik (area publik) adalah kawasan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat berkumpul dan beraktivitas. Lokasi area publik ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo.

Rumus untuk menghitung Persentase ketersediaan akses internet publik yaitu Jumlah area publik yang sudah terfasilitasi akses internet dibagi Jumlah area publik dikali 100%.

Sampai dengan awal tahun 2022 ini tercatat ada 60 area publik yang menjadi urusan Dinkominfo dalam pemenuhan kebutuhan akses internet. Jumlah area publik yang sudah terfasilitasi jaringan internet publik dari Dinkominfo dengan kecepatan 2 mbps dedicated mulai tahun 2017 s.d tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21
Area publik Kabupaten Temanggung yang sudah terfasilitasi jaringan internet Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah area publik yang sudah terfasilitasi akses internet	7	25	41	44	44	48
2	Jumlah area publik	25	60	60	60	60	60
3	Persentase ketersediaan akses internet publik	28	41,6	68,3	73,33	73,33	80,00

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2022

Saat ini jumlah area publik yang telah difasilitas akses internet gratis 48 titik. Penambahan sebesar 4 titik di tahun 2022 ditempatkan di Pasar Parakan 2 titik, RSUD Barat Ruang Tunggu, dan Puskesmas Candioto.

Faktor pendorong ketercapaian indikator tersebut terdiri atas faktor teknis dan non teknis. Secara teknis beberapa hal yang mendorong capaian indikator adalah:

- a) kecukupan bandwidth untuk area publik didukung oleh penyedia ISP dengan jalur terpisah dari jalur utama Jaringan Internet Pemerintah Daerah sehingga secara beban bandwidth cenderung stabil dan tercukupi;
- b) tersedianya jaringan internet secara mandiri non jaringan kominfo pada beberapa fa pendukung tercapainya indikator ketersediaan akses internet publik. Namun hal tersebut akan menjadi layanan dengan tampilan berbeda karena tidak melalui landing page / login page jaringan publik kominfo, dimana pada halaman login terdapat informasi Free Wifi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- c) lokasi pada daftar area publik yang menjadi target kegiatan berdasarkan tinjauan pemetaan jaringan sangat memungkinkan untuk dilakukan koneksi sehingga bisa diselenggarakan hotspot untuk area tersebut.

Sementara itu dari sisi non teknis telah direncanakan alokasi anggaran pemeliharaan dan pengadaan peralatan jaringan untuk memenuhi kebutuhan terselenggaranya hotspot di area publik pada tahun 2023.

Faktor penghambat indikator tersebut terdiri atas beberapa hal, diantaranya adalah:

- a) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun penganggaran Dinas Kominfo mengalami pengurangan cukup signifikan karena adanya refocusing anggaran

untuk penanggulangan dan pemulihan dampak Covid-19 sehingga tidak ada kegiatan penambahan peralatan pada lokasi hotspot area publik. Bahkan hotspot area publik eksisting dilakukan pembatasan layanan untuk menghindari kerumunan di area publik demi pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Temanggung;

- b) beberapa lokasi area publik belum tersedia jaringan listrik untuk peralatan jaringan seperti pada citywalk, taman-taman dan pasar sehingga perlu ada pekerjaan ekstra untuk menggelar jaringan kelistrikan. Namun demikian diantara lokasi tersebut bisa dilakukan koneksi jalur kelistrikan sehingga layanan hotspot area publik bisa tercapai;
- c) beberapa peralatan yang ada pada lokasi eksisting pelayanan hotspot area publik rusak dan bahkan sudah tidak ada pada tempatnya, besar kemungkinan hilang. Dinas Kominfo telah melakukan pengecekan ke seluruh lokasi eksisting untuk pendataan dan kalkulasi kebutuhan penggantian alat yang rusak dan hilang dan diajukan pada penganggaran 2023.

Pada triwulan 4 tahun 2022 untuk jumlah area publik yang difasilitas internet gratis masih 48 titik atau tidak ada perubahan dikarenakan faktor sebagai berikut:

- a. Dari 12 titik lokasi tidak tercover oleh Jaringan Kominfo
- b. Untuk mengkoneksikan dengan jaringan kominfo di perlukan 1 set peralatan antena yang biayanya per titik lokasi besar.
- c. Kominfo sudah mencoba mengajukan anggaran untuk peralatan antena tersebut tapi masih belum dapat persetujuan.

Tabel 2.22
Lokasi area publik Kabupaten Temanggung s.d
Tahun 2022

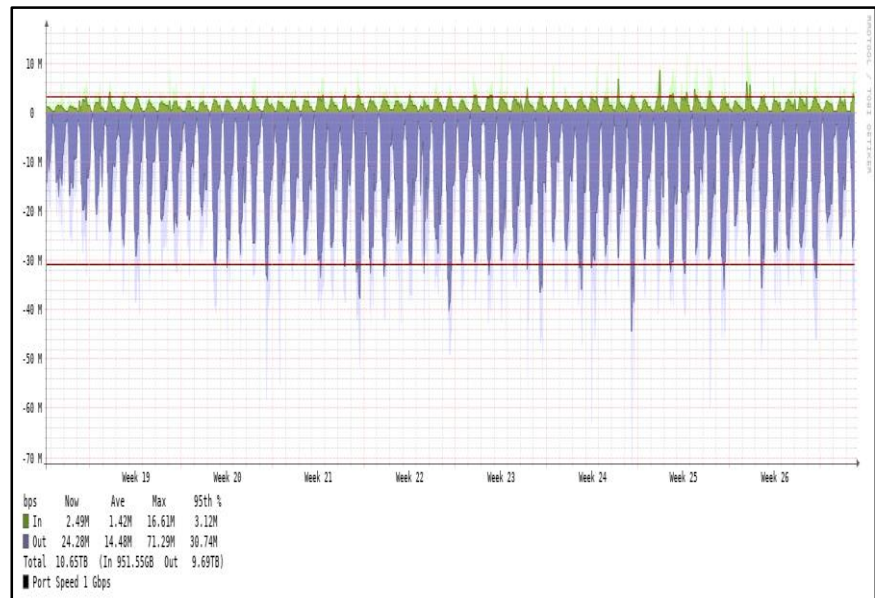
No	Lokasi Area Publik	Tahun Pene-tapan	Tahun Pema-sangan	Status Jaringan
1	Halaman Kantor Kearsipan dan Perpustakaan	2016	2016	Aktif
2	Areal pusat Komunitas kreatif	2016	2016	Aktif
3	Alun-Alun	2016	2016	Aktif
4	Taman Pengayoman	2016	2016	Aktif
5	Area Pendopo Jenar	2016	2016	Aktif
6	Area Setda	2016	2016	Aktif
7	Pikatan Waterpark	2017	2017	Aktif
8	Taman Kali Progo	2018	2018	Aktif
9	Pujasera	2018	2018	Aktif
10	Taman kartini	2016	2016	Aktif
11	Tirto Asri Water splash	2018	2018	Aktif
12	Hutan Kota Gumuk Lintang	2018	2018	Aktif
13	City Walk (tugu jam)	2018	2018	Aktif
14	Pasar Kliwon	2018	2018	Aktif
15	Plaza (Pasar Temanggung Permai)	2018	2018	Aktif
16	Area Kuliner Samping DPRD	2018	2018	Aktif
17	Majid Agung Darussalam	2018	2018	Aktif
18	Citywalk Depan Diskominfo	2018	2018	Aktif
19	Citywalk Depan Kecamatan Temanggung	2018	2018	Aktif
20	Area RSUD Djoyonegoro	2018	2018	Aktif
21	Area Lapangan TV Temanggung	2018	2018	Aktif
22	Area Pasar Burung Kerkop	2018	2018	Aktif
23	Terminal Temanggung	2018	2018	Aktif
24	GOR Bambu Runcing	2018	2018	Aktif
25	Komplek Stadion	2018	2018	Aktif
26	Citywalk depan kantor NU	2019	2019	Aktif
27	Citywalk depan warung jadul	2019	2019	Aktif
28	RSUD timur bagian dalam	2019	2019	Aktif
29	RSUD barat ruang tunggu	2019	2022	Aktif
30	Ruang pelayanan Dindukcapil	2019	2019	Aktif
31	Taman Bambu Runcing	2019	2019	Aktif
32	Pasar Parakan1 - selatan lantai 1	2019	2020	Aktif
33	Pasar Parakan2 - utara lantai 1	2019	2020	Aktif
34	Pasar Parakan3 - selatan lantai 1	2019	2022	Aktif
35	Pasar Parakan4 - selatan lantai 2	2019	2022	Aktif
36	Ruang tunggu Puskesmas Temanggung	2019	2019	Aktif

No	Lokasi Area Publik	Tahun Pene-tapan	Tahun Pema-sangan	Status Jaringan
37	Ruang tunggu Puskesmas Tlogomulyo	2019	-	-
38	Ruang tunggu Puskesmas Tembarak	2019	-	-
39	Ruang tunggu Puskesmas Selopampang	2019	-	-
40	Ruang tunggu Puskesmas Pringsurat	2019	-	-
41	Ruang tunggu Puskesmas Rejosari	2019	2019	Aktif
42	Ruang tunggu Puskesmas Kranggan	2019	-	-
43	Ruang tunggu Puskesmas Banjarsari	2019	2019	Aktif
44	Ruang tunggu Puskesmas Parakan	2019	2019	Aktif
45	Ruang tunggu Puskesmas Traji	2019		
46	Ruang tunggu Puskesmas Bulu	2019	2019	Aktif
47	Ruang tunggu Puskesmas Ngadirejo	2019	-	-
48	Ruang tunggu Puskesmas Kaloran	2019	-	-
49	Ruang tunggu Puskesmas Tepusen	2019	-	-
50	Ruang tunggu Puskesmas Candirototo	2019	2022	Aktif
51	Ruang tunggu Puskesmas Bejen	2019	-	-
52	Ruang tunggu Puskesmas Bansari	2019	2019	Aktif
53	Ruang tunggu Puskesmas Wonoboyo	2019	-	-
54	Ruang tunggu Puskesmas Tretep	2019	2019	Aktif
55	Ruang tunggu Puskesmas Kedu	2019	2019	Aktif
56	Ruang tunggu Puskesmas Kledung	2019	2019	Aktif
57	Ruang tunggu Puskesmas Kandangan	2019	2019	Aktif
58	Ruang tunggu Puskesmas Jumo	2019	-	-
59	Ruang tunggu Puskesmas Gemawang	2019	2019	Aktif
60	Ruang tunggu Puskesmas Dharmarini	2019	2019	Aktif
Jumlah		60	60	48

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2022

Penggunaan bandwidth untuk seluruh area mencapai titik maksimal 36.30 Mbps sebagaimana

ditunjukkan pada gambar 2.9 tentang grafik okupansi bandwidth internet publik.



Gambar 2.8
Grafik Okupansi Bandwidth Internet Publik

e. Persentase Ketersediaan Jaringan Intranet

Jaringan Internet sebagai sebuah sistem adalah Sistem jaringan yang terkait dalam lingkup global dan memfasilitasi komunikasi layanan data seperti *remote login*, *transfer file*, surat elektronik, *World Wide Web* dan *newsgroup*. Ketersediaan jaringan internet merupakan kebutuhan dasar komunikasi data antar lingkungan kerja yang saling terhubung.

Jaringan intranet dilewatkan melalui media kabel (*wired*) dan nirkabel (*wireless*) dengan topologi tertentu. System ini merupakan jalan utama interkoneksi untuk pemanfaatan layanan SPBE. Angka presentasi ketersediaan jaringan intranet diperoleh dari rumus jumlah OPD, UPT dan Desa/Kelurahan yang terhubung dengan jaringan dari Dinkominfo dibagi dengan jumlah seluruh OPD, UPT dan Desa/Kelurahan dikali 100%. Adapun capaian hingga tahun 2022 triwulan IV disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.23
 Persentase Ketersediaan Jaringan Internet Kabupaten
 Temanggung Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah OPD, UPT (eks UPT) dan Desa/Kel. Yang terhubung	146	235	317	324	348	323
2	Jumlah OPD, UPT (eks UPT) dan Desa/Kel.	395	395	395	395	395	384
3	Ketersediaan jaringan intranet	36,96 %	59,49 %	80,25 %	82,03 %	88,10 %	84,11 %

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2022

Dari Tabel 2.23 dapat dilihat bahwa ketersediaan jaringan intranet sejak tahun 2017 s.d 2022 cenderung meningkat, karena tahapan pengembangan distribusi jaringan sesuai dengan perencanaan serta dukungan penganggaran. Pada Tabel 2.22 diperlihatkan jumlah ketersediaan jaringan intranet secara rinci.

Terjadi perubahan angka pada jumlah OPD, UPT (eks UPT) dan Desa/Kelurahan karena menyesuaikan dengan status kantor dan perubahan SOTK dalam hal ini adalah OPD dan UPT . Pada OPD ada 2 Dinas yang dijadikan satu yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan dan Peternakan menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Pada data sebelumnya ada beberapa kantor yang dimasukkan dalam kategori UPT karena menjadi bagian dari wilayah kerja pelayanan OPD. Diantara yang dihapus adalah:

- 1) Pusat Komunitas Kreatif dan UMKM Center
- 2) Laboratorium BKPSDM
- 3) BAZ
- 4) PMI
- 5) Ex Kawedanan Parakan

- 6) Rusunawa Parakan
- 7) Rusunawa Kranggan
- 8) BKAD Bulu
- 9) Temanggung TV
- 10) Erte FM

Sehingga dari jumlah target 395 menjadi 384

Faktor pendorong ketercapaian indikator ketersediaan jaringan intranet adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan Daerah nomor 22 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Temanggung nomor 83 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mendorong pemanfaatan jaringan intranet untuk proses bisnis Pemerintah Kabupaten Temanggung
- b) Telah tersedia *repeater* di beberapa lokasi yang dapat mendukung koneksi jaringan ke kantor – kantor pemerintah desa tersebut;
- c) Dari sisi kemampuan dan *occupancy* kapasitas alat masih mencukupi untuk mengcover beban trafik internet maupun intranet kantor-kantor Pemerintah Desa tersebut;
- d) Telah diaktifkan jaringan VPN (Virtual Private Network) Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mengakomodir kantor-kantor pemerintah desa yang belum terhubung dengan jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk melakukan akses pada aplikasi yang bersifat internal dan berjejaring intra. Sehingga tidak ada kendala manakala kantor tersebut belum terhubung secara langsung dengan jaringan lokal Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Adapun faktor penghambat indikator tersebut adalah belum adanya kebijakan khusus yang mengatur secara detil terkait dengan layanan internal Pemerintah Daerah yang bersifat tertutup dengan jaringan intra secara efektif. Aplikasi internal masih menggunakan jalur internet karena dengan alasan untuk kemudahan akses meskipun memiliki resiko kerawanan keamanan data. Hal ini menjadikan Kantor Desa yang telah memiliki jaringan internet secara mandiri di luar jaringan Pemerintah Kabupaten tidak begitu membutuhkan jaringan intra Pemerintah dalam melakukan proses kerja dan pelayanan.

Tabel 2.24
Detail Ketersediaan Jaringan Internet Kabupaten
Temanggung, Tahun 2022

No	Uraian	2022	Kondisi	
			aktif	Tidak aktif
1	Jumlah Kantor/Badan/Dinas	26	26	-
2	Jumlah Kecamatan	20	20	-
3	Jumlah Kelurahan	23	23	-
4	Jumlah Desa	207	191	16
5	Jumlah UPT/eks UPT	47	47	-
JUMLAH		323	307	16

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2022

f. Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Sistem informasi yang terintegrasi merupakan sistem informasi yang saling berhubungan antara satu

dengan yang lain, sehingga data dari suatu sistem dapat melintas, atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.

Angka persentase sistem informasi yang terintegrasi diperoleh menggunakan rumus jumlah sistem informasi yang terintegrasi dibagi dengan jumlah sistem informasi yang ada pada masing-masing tahun dikalikan 100 %.

Tabel 2.25
Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi
Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi	19	31	61	82	87	53
2	Jumlah sistem informasi	398	456	461	507	512	101
3	Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi	4,7 %	6,79 %	13,23 %	16,17 %	16,99 %	52,48 %

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2022

Berdasarkan Tabel 2.25 dapat dilihat bahwa persentase sistem informasi yang terintegrasi pada tahun 2017-2022 cenderung mengalami peningkatan, karena adanya pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi lainnya. Namun demikian masih diperlukan regulasi yang mengatur pengembangan sistem informasi sebagai acuan dasar dalam perencanaan integrasi sistem informasi.

Terjadi perubahan jumlah sistem informasi yang menjadi acuan target kinerja yang semula berjumlah 512 aplikasi berubah menjadi 101 aplikasi. Perubahan dilakukan setelah dilakukan evaluasi terkait dengan sistem informasi yang pada dasarnya merupakan duplikasi dari satu aplikasi namun dihitung menjadi beberapa lembaga pengguna. Dampaknya adalah terjadi perbedaan jumlah aplikasi eksisting dengan

jumlah pada data lembaga. hasil evaluasi jumlah adalah sebagai berikut :

- 1) Website kecamatan semula dihitung 20 aplikasi menjadi 1 aplikasi;
- 2) Sistem Informasi Desa (SID) semula dihitung 266 menjadi 1 aplikasi;
- 3) Website OPD semula dihitung 19 menjadi 1 aplikasi;
- 4) Paten – Kecamatan semula dihitung 20 menjadi 1 aplikasi;
- 5) Simpus semula dihitung 26 menjadi 1 aplikasi;
- 6) Web Puskesmas semula 26 dihitung menjadi 1 aplikasi;
- 7) Aplikasi PPID Pembantu semula 44 dihitung menjadi 1 aplikasi;

Total pengurangan jumlah aplikasi duplikasi adalah 414 aplikasi.

Pada tahun 2022 di Kabupaten Temanggung terjadi penambahan 2 Aplikasi yaitu aplikasi e Pak Guru dan Pesan Perak.tetapi yang sudah terintegrasi hanya e Pak guru.

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi diantaranya adalah :

- 1) Peraturan Daerah nomor 22 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Temanggung nomor 83 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mendorong integrasi sistem dan data untuk pelayanan dan proses bisnis Pemerintah Daerah;

- 2) Beberapa aplikasi merupakan pengembangan mandiri *programmer* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga memiliki desain dan struktur data yang memungkinkan untuk diintegrasikan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain;
- 3) Kebijakan Pemerintah dalam rangka pelayanan berbasis sistem elektronik membuka pintu integrasi antar aplikasi dan data yang saling mendukung pelayanan sehingga integrasi aplikasi dan data menjadi suatu kebutuhan yang mendapatkan perhatian;
- 4) Kesadaran OPD akan keamanan dan kemudahan sistem informasi yang saling terintegrasi dalam proses pelayanan dan proses bisnis internal.

Faktor penghambat tercapainya indikator diantaranya adalah :

- 1) Beberapa aplikasi hanya bersifat *temporer* yang disebabkan kebutuhan mendesak karena darurat. Contohnya adalah aplikasi perhitungan pilkades yang merupakan event pemilihan kepala desa yang belum tentu dilaksanakan setiap tahun. Aplikasi bersifat insidentil tanpa melibatkan unsur integrasi data;
- 2) Terdapat aplikasi yang dikembangkan oleh penyedia jasa aplikasi non pemerintah yang menggunakan bahasa pemrograman dan sistem *database* yang tidak *familiar* dengan bahasa pemrograman dan sistem *database* aplikasi dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung sehingga menjadi kendala dalam proses integrasi sistem dan data;
- 3) Perubahan kebijakan akses data kependudukan menjadi langkah mundur proses integrasi data khususnya pada aplikasi pelayanan publik yang menggunakan data dasar NIK;

- 4) Belum adanya standar baku pembangunan dan pengembangan sistem informasi.

Data sistem informasi yang terintegrasi pada sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26
Sistem Informasi yang Terintegrasi

No	Nama Sistem Informasi	Tahun Terintegrasi	Jml Apl	Jml Duplikasi	Terintegrasi Dengan
1	Aplikasi Android Kependudukan Temanggung Gadem Pol	2020	1	1	data kependudukan
2	Aplikasi Android Temanggung Gadem	2020	1	1	Gadem, E-Statistik, PPID, JDIH, Media Center
3	Aplikasi ANJAB dan ABK	2017	1	1	E-Kinerja
4	Aplikasi Dashboard Geospasial	2020	1	1	GIS Tata Ruang
5	Aplikasi Pendataan Pemudik	2020	1	1	data kependudukan
6	Aplikasi SANKA Android	2020	1	1	Data Kependudukan
7	Aplikasi SANKA Web	2020	1	1	Data Kependudukan
8	Bankdata	2016	1	1	Gadem
9	BKPSDM	2017	1	1	Simpeg, E-Kinerja, Absensi
10	Dashboard SIMPUS	2020	1	1	simpus di puskesmas se-Kabupaten Temanggung
11	data	2016	1	1	Gadem
12	e-dokum (katalog dokumen hukum)	2018	1	1	jdih
13	e-kinerja	2017	1	1	simpeg, e-tpg, monitor absen
14	E-Office	2020	1	1	simpeg, jdih
15	e-peluk ASN	2017	1	1	simpeg
16	e-risalah	2019	1	1	Jdih
17	E-Retribusi Pasar	2021	1	1	Bank Jateng
18	e-Statistik	2019	1	1	PPID, Tmg Gadem
19	E-Surat RSUD	2021	1	1	Simpeg
20	e-TPP	2017	1	1	simpeg, e-kinerja, monitor absen

No	Nama Sistem Informasi	Tahun Terintegrasi	Jml Apl	Jml Duplikasi	Terintegrasi Dengan
21	Gabungan Data (Gandem)	2016	1	1	bank data, sipd, data
22	Gis Tata Ruang	2018	1	1	GIS Terintegrasi
23	jdih	2018	1	1	e-dokum
24	layanan kependudukan online	2017	1	1	data kependudukan
25	LPSE	2016	1	1	Sirup
26	mapatda	2017	1	1	sibangda, sig-mapatda
27	media center	2020	1	1	Temanggung Gandem
28	monitorabsen (E-Absensi)	2017	1	1	e-tpp
29	Portal VPN dan SSO	2018	1	1	sistem informasi lain
30	PPDB Online	2020	1	1	PPDB Pusat
31	PPID Pembantu	2017	1	53	PPID Utama
32	PPID Utama	2020	1	1	Temanggung Gandem
33	SIAK	2020	1	1	data kependudukan
34	SID	2015	1	289	PPID
35	sig-mapatda-bppkad	2017	1	1	mapatda
36	SIMBOS	2020	1	1	SIMBOS Pusat
37	SIMKB	2020	1	1	Data kependudukan
38	SIMPAS	2021	1	1	retribusi pasar
39	simpeg	2017	1	1	e-kinerja, e-tpp, monitor absen, p2kp
40	simpelbangda	2021	1	1	Sirup
41	SIMPKK	2020	1	1	Data Kependudukan
42	SIMPUS	2017	1	26	capil dan bpjs
43	SIMRS	2020	1	1	BPJS
44	SIPD	2017	1	1	Gandem
45	SIPT Upload	2021	1	1	sipt.temanggungkab.go.id
46	Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)	2020	1	1	MAPATDA
47	sms	2019	1	1	Lapor SP4N
48	Website Corona	2020	1	1	Corona Jateng
49	Sirup	2019	1	1	Simpelbangda
50	P-Care	2020	1	1	Simpus
51	Siap Pakde	2021	1	1	Bank Jateng
52	E Pak Guru	2022	1	1	Simpeg
JUMLAH			52	529	

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2022

Tabel 2.27
Detail Sistem Informasi Kabupaten Temanggung

No	Nama Sistem Informasi	Tahun Pembuatan	Jml Apl	Jml Dupli-kasi	Keterangan
1	Apdul (Schedule)	2019	1	1	Aplikasi untuk melakukan pengaturan schedule kegiatan
2	Aplikasi Android Kependudukan Temanggung Gandem Pol	2020	1	1	Aplikasi android untuk pelayanan kependudukan
3	Aplikasi Android Temanggung Gandem	2020	1	1	Aplikasi android yang menampilkan data dan informasi serta pelayanan publik di Temanggung
4	Aplikasi ANJAB dan ABK	2017	1	1	Aplikasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
5	Aplikasi Dashboard Geospasial	2020	1	1	Aplikasi dashboard yang menampilkan informasi berbasis geospasial
6	Aplikasi Pendataan Pemudik	2020	1	1	Aplikasi untuk pendataan pemudik Temanggung
7	Aplikasi Rusunawa		1	1	Sistem informasi dan Aplikasi pembayaran Rusunawa
8	Aplikasi SANKA Android	2020	1	1	Aplikasi Santunan Kematian berbasis Android
9	Aplikasi SANKA Web	2020	1	1	Aplikasi Santunan Kematian berbasis Website
10	Bankdata	2016	1	1	Sistem Informasi / Aplikasi Dari Pemerintah (daerah) Terkait Dengan Kumpulan Data Data / Aset Penting Di Pemerintah Kabupaten Temanggung
11	Bibliotecha Dinarpus	2019	1	1	Portal Sistem Informasi katalog buku Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
12	BKPSDM	2017	1	1	Portal Sistem Informasi BKPSDM
13	cellplan		1	1	Sistem Informasi Pengecekan Koordinat cellplan Menara Telekomunikasi Kabupaten Temanggung
14	Dashboard Dinkes		1	1	Halaman Dashboard Dinas Kesehatan
15	Dashboard SIMPUS	2020	1	1	Gabungan Data Transaksi Layanan Kesehatan pada SIMPUS se-Kabupaten Temanggung
16	data	2016	1	1	portal untuk menjembatani pengambilan data dari Bank Data Pembangunan ke Aplikasi Gandem
17	Data Kemiskinan Daerah (Santunan Kematian)	2020	1	1	Sistem Informasi Santunan Kematian Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
18	e-Bumdes	2021	1	1	Sistem Informasi Badan Usaha Milik Desa

No	Nama Sistem Informasi	Tahun Pembuatan	Jml Apl	Jml Dupli-kasi	Keterangan
19	e-dokum (katalog dokumen hukum)	2018	1	1	aplikasi yang menampilkan katalog dokumen hukum/ peraturan
20	E-Keuangan	2020	1	1	Layanan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik
21	e-kinerja	2017	1	1	aplikasi manajemen kinerja pegawai
22	e-monev	2018	1	1	Aplikasi monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan
23	E-Office	2020	1	1	Aplikasi Surat Elektronik dan Pengelolaan Kearsipan
24	e-peluk ASN	2017	1	1	aplikasi pelayanan keluhan ASN
25	e-risalah	2019	1	1	Aplikasi Tentang Pengelolaan Risalah DPRD Kabupaten Temanggung
26	E-Rretribusi Pasar	2021	1	1	Retribusi Pasar integrasi db dengan aplikasi Simpas
27	e-Statistik	2019	1	1	Sistem Informasi / Aplikasi Penyaji Data Statistik Kab. Temanggung Untuk Membantu Memudahkan Pengguna Mengakses Data Secara Cepat Dan Mudah
28	E-Surat RSUD	2021	1	1	Surat Keluar masih manual, API WA ikut wablas RSUD
29	e-TPP	2017	1	1	istem Informasi / Aplikasi Untuk Mendata Tunjangan Pokok Pegawai Di Kabupaten Temanggung
30	Evarenbang	2019	1	1	SISTEM INFORMASI EVALUASI MUSRENBANG RKPDI KELURAHAN
31	Gabungan Data (Gandem)	2016	1	1	Sistem Informasi Pusat Data Terpadu (Gabungan Data Temanggung)
32	Gis Tata Ruang	2018	1	1	sistem proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Temanggung yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang di Kabupaten Temanggung
33	Hebat		1	1	Website himpunan berita Temanggung (Humas)
34	jdih	2018	1	1	Aplikasi yang menampilkan dokumentasi dan informasi hukum
35	Kejari	2021	1	1	Website Kejaksaan Negeri
36	Laporan Kinerja Kecamatan	2021	1	1	Aplikasi Pencatat Kinerja Kecamatan pada Pemerintahan Kab. Temanggung

No	Nama Sistem Informasi	Tahun Pembuatan	Jml Apl	Jml Duplikasi	Keterangan
37	Layanan 24/7	2020	1	1	Sistem Informasi Layanan 24/7
38	layanan kependudukan online	2017	1	1	Aplikasi Pelayanan Kependudukan secara Online
39	LPSE	2016	1	1	Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
40	mail		1	1	Aplikasi Email Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung
41	mapatda	2017	1	1	Sistem Informasi / Aplikasi Tentang Pelayanan Pajak Daerah Berbasis Kinerja Integrasi Data
42	media center	2020	1	1	Website Resmi Media Center Kabupaten Temanggung
43	monitorabsen (E-Absensi)	2017	1	1	Sistem Informasi untuk melakukan monitoring absensi pegawai
44	NMS		1	1	Aplikasi untuk memonitoring jaringan
45	paten-kecamatan		1	1	Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
46	Portal Sistem Informasi	2019	1	1	Portal kumpulan semua Sistem Informasi / Aplikasi yang terdata di Kabupaten Temanggung
47	Portal VPN dan SSO	2018	1	1	Portal Aplikasi terintegrasi yang menerapkan teknologi VPN
48	PPDB Online	2020	1	1	Portal Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Temanggung
49	PPID Pembantu	2017	1	53	Website resmi PPID Pembantu di Kabupaten Temanggung
50	PPID Utama	2020	1	1	Aplikasi PPID Utama Pemkab Temanggung
51	puskomkref	2015	1	1	Website puskomkref
52	Registrasi Tenaga Penunjang		1	1	Aplikasi Registrasi Tenaga Penunjang Kabupaten Temanggung
53	Rekap Pilkades		1	1	aplikasi untuk rekap cepat Pemilihan Kepala Desa di Kab. Temanggung
54	rupabumi	2020	1	1	Aplikasi untuk mempermudah pendataan Cagar Budaya di Kabupaten Temanggung
55	Saran Aduan SIMDKT		1	1	Sistem Informasi / Aplikasi Dari Pemerintah (daerah) Terkait Dengan Pelaporan Saran Dan Aduan Informasi Data Kemiskinan Yang Ada Di Kabupaten Temanggung

No	Nama Sistem Informasi	Tahun Pembuatan	Jml Apl	Jml Duplikasi	Keterangan
56	SIAK	2020	1	1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
57	SIASMARA	2021	1	1	Persuratan Dinkes
58	SID	2015	1	289	Sistem Informasi Desa dan Kelurahan
59	sig-mapatda-bppkad	2017	1	1	Aplikasi Manajemen Pendapatan Daerah berbasis Peta
60	Simbada		1	1	Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) untuk mengelola Aset di masing-masing instansi
61	SIMBOS	2020	1	1	Sistem Informasi Bantuan Operasional Sekolah
62	SIMKB	2020	1	1	Aplikasi untuk mengelola data keluarga berencana
63	SIMPAS	2021	1	1	aplikasi transaksi pasar
64	simpeg	2017	1	1	Aplikasi manajemen kepegawaian
65	simpelbangda	2021	1	1	Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Daerah
66	SIMPKK	2020	1	1	Aplikasi pencatat data PKK
67	SIMPUS	2017	1	26	Sistem Informasi Puskesmas
68	SIMRS	2020	1	1	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
69	simwasda.inspektorat	2017	1	1	Sistem Informasi Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung (SIMWASDA)
70	Sinkronisasi Vaksin	2021	1	1	Capaian data vaksinasi (import data excel kependudukan dan KPCPEN dinkes)
71	SIPD	2017	1	1	Sistem Informasi / Aplikasi Yang Mendokumentasikan, Mengadministrasikan, Serta Mengolah Data Pembangunan Daerah Menjadi Informasi Yang Disajikan Kepada Masyarakat Dan Sebagai Bahan Dalam Pengambilan Keputusan
72	Sipemdes	2021	1	1	Sistem Informasi Perangkat Desa
73	SIPT		1	1	Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) Dinas Kesehatan
74	SIPT Upload	2021	1	1	Aplikasi alternatif upload data SIPT (Anak, Ibu, Gizi)
75	Siskeudes		1	1	Sistem Informasi Keuangan Desa
76	Sistem informasi Koperasi (Sinkop)		1	1	Sistem Informasi Koperasi
77	Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)	2020	1	1	Sistem Informasi untuk mengelola Objek Pajak

No	Nama Sistem Informasi	Tahun Pembuatan	Jml Apl	Jml Dupli-kasi	Keterangan
78	Sistem Informasi Pendataan Industri (Sinpi)		1	1	Sistem Informasi untuk Pendataan Industri
79	sms	2019	1	1	Aplikasi pengaduan melalui SMS Gateway
80	Temanggung Bebas Sampah	2021	1	1	sistem aplikasi pencatat data rekap dan pelaporan sampah
81	Temanggung Bebas Sampah Android	2021	1	1	Sistem Aplikasi Pelaporan dan Pendataan Sampah
82	temanggungkab.go.id		1	1	Sebuah Portal website Kabupaten Temanggung
83	web puskesmas		1	26	Website Resmi Pusat Kesehatan Masyarakat
84	Website Corona	2020	1	1	Memaparkan informasi sebaran virus corona perkecamatan (integrasi dengan Corona Jateng)
85	Website Dinbudpar	2021	1	1	Website + Administrasi
86	Website Dindikpora	2018	1	1	Website Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
87	Website Dinsos		1	1	Website Dinas Sosial
88	Website Disdukcapil	2017	1	1	Website Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil
89	website kecamatan		1	20	Website resmi Kecamatan
90	Website OPD		1	22	Website resmi OPD
91	Website Temanggung TV		1	1	Website resmi Temanggung TV
92	Online Single Submission (OSS)		1	1	Aplikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
93	Sirup		1	1	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
94	Sanapati		1	1	Surel ekstra pengamanan dari BSSN
95	SAPK		1	1	Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian
96	SI JARI ON AKD		1	1	Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi
97	P-Care		1	1	Layanan pasien BPJS
98	Siap Pakde	2021	1	1	Sistem Informasi Pendapatan Pajak Daerah
99	e-pak guru	2022	1	1	Sistem Informasi untuk penilaian angka kredit guru di Kabupaten Temanggung
100	Pesan Perak	2022	1	1	Sistem informasi untuk pengaduan kekerasan perempuan dan anak
101	SIM PBJ	2022	1	1	Sistem informasi untuk pengelolaan data pengadaan barang Jasa tender dan nontender
	Jumlah		101	531	

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2022

Pada akhir tahun 2022 Di Kabupaten Temanggung terdapat 101 Sistem Informasi yang aktif

dibawah pemantauan Dinas Kominfo. Beberapa sistem informasi yang belum terintegrasi dikarenakan sistem informasi yang telah dibangun sebelumnya menggunakan teknologi yang berbeda-beda sehingga mempersulit pengintegrasian antar sistem informasi.

g. Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal

Sistem informasi yang berfungsi optimal adalah sistem informasi yang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, baik secara sistem, pengelolaan, maupun penggunaannya.

Angka persentase sistem informasi yang berfungsi optimal diperoleh menggunakan rumus jumlah sistem informasi yang berfungsi optimal dibagi dengan jumlah sistem informasi yang ada pada masing-masing tahun dikali 100%.

Realisasi persentase sistem informasi yang berfungsi optimal di Kabupaten Temanggung tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.28 berikut:

Tabel 2.28
Persentase Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal
Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah sistem informasi yang berfungsi optimal	29	175	185	265	267	69
2	Jumlah sistem informasi	398	456	461	507	512	101
3	Persentase Sistem Informasi yang berfungsi optimal	7,2 %	38,38 %	40,13 %	52,27 %	52,15 %	69 %

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2022

Berdasarkan Tabel 2.28 di dapat dilihat bahwa persentase sistem informasi yang berfungsi optimal pada tahun 2017-2022 mengalami peningkatan,

karena telah diadakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan sistem informasi. Namun demikian masih diperlukan peningkatan kemauan dan kemampuan bagi pengelola agar sistem informasi dapat berfungsi secara optimal.

Perubahan jumlah sistem informasi menyesuaikan dengan hasil evaluasi aplikasi yang pada dasarnya adalah duplikasi atas satu aplikasi menjadi beberapa aplikasi sesuai jumlah lembaga pengguna. Hal ini sama dengan penyesuaian pada indikator sistem informasi yang terintegrasi.

Faktor pendukung ketercapaian indikator sistem informasi yang berfungsi optimal adalah :

- 1) Peraturan Daerah nomor 22 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Temanggung nomor 83 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mendorong pemanfaatan sistem informasi untuk pelayanan dan proses bisnis Pemerintah Daerah;
- 2) Regulasi tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu pendorong pemanfaatan sistem informasi untuk memberikan layanan informasi publik secara berkala sehingga aplikasi bisa berfungsi secara optimal;
- 3) Tercukupinya infrastruktur TIK di data center serta pengelolaan domain dan subdomain Pemerintah Kabupaten Temanggung secara mandiri mendorong pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan data, sistem dan informasi secara berkala;
- 4) Pengelolaan jaringan internet yang baik ke seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Temanggung memberikan akses yang baik dalam pengelolaan sistem informasi.

Faktor Penghambat ketercapaian indikator sistem informasi yang berfungsi optimal adalah :

- 1) Sistem informasi yang bersifat insidental menjadi penghambat pencapaian indikator sistem informasi pada tahun berjalan. Hal ini dikarenakan pemanfaatan sistem informasi hanya pada saat tertentu, seperti aplikasi perhitungan pilkades, pemantauan pemudik, registrasi tenaga penunjang dan lain-lain;
- 2) Beberapa aplikasi yang dikembangkan merupakan permintaan OPD yang bersifat *temporer* yang kemudian tidak ada tindak lanjut pemanfaatan sistem informasi baik dari sisi data maupun informasi;
- 3) Terbitnya kebijakan dari Pemerintah Pusat yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menggunakan sistem informasi umum hasil pengembangan Pemerintah Pusat untuk proses bisnis perencanaan, pelaksanaan dan monev sehingga sistem informasi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Daerah tidak digunakan.

Adapun data sistem informasi yang berfungsi optimal pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29
Data Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal s.d
Tahun 2022

No	Nama Sistem Informasi	Tahun	Optimal	
			Ya	Tidak
1	Apdul (Schedule)	2019	Ya	
2	Aplikasi Android Kependudukan Temanggung Gandem Pol	2020	Ya	
3	Aplikasi Android Temanggung Gandem	2020	Ya	
4	Aplikasi ANJAB dan ABK	2017	Ya	
5	Aplikasi Dashboard Geospasial	2020		Tidak
6	Aplikasi Pendataan Pemudik	2020		Tidak

No	Nama Sistem Informasi	Tahun	Optimal	
			Ya	Tidak
7	Aplikasi Rusunawa		Ya	
8	Aplikasi SANKA Android	2020	Ya	
9	Aplikasi SANKA Web	2020	Ya	
10	Bankdata	2016	Ya	
11	Bibliotеча Dinarpus	2019	Ya	
12	BKPSDM	2017	Ya	
13	cellplan		Ya	
14	Dashboard Dinkes		Ya	
15	Dashboard SIMPUS	2020	Ya	
16	data	2016		Tidak
17	Data Kemiskinan Daerah (Santunan Kematian)	2020		Tidak
18	e-Bumdes	2021		Tidak
19	e-dokum (katalog dokumen hukum)	2018	Ya	
20	E-Keuangan	2020	Ya	
21	e-kinerja	2017	Ya	
22	e-monev	2018		Tidak
23	E-Office	2020	Ya	
24	e-peluk ASN	2017	Ya	
25	e-risalah	2019		Tidak
26	E-Rretribusi Pasar	2021	Ya	
27	e-Statistik	2019	Ya	
28	E-Surat RSUD	2021	Ya	
29	e-TPP	2017	Ya	
30	Evarembang	2019		Tidak
31	Gabungan Data (Gandem)	2016		Tidak
32	Gis Tata Ruang	2018	Ya	
33	Hebat		Ya	
34	jdih	2018	Ya	
35	Kejari	2021	Ya	
36	Laporan Kinerja Kecamatan	2021	Ya	
37	Layanan 24/7	2020	Ya	
38	layanan kependudukan online	2017	Ya	
39	LPSE	2016	Ya	
40	mail		Ya	
41	mapatda	2017		Tidak
42	media center	2020	Ya	
43	monitorabsen (E-Absensi)	2017	Ya	
44	NMS		Ya	
45	paten-kecamatan			Tidak
46	Portal Sistem Informasi	2019		Tidak
47	Portal VPN dan SSO	2018		Tidak
48	PPDB Online	2020	Ya	
49	PPID Pembantu	2017	Ya	
50	PPID Utama	2020	Ya	
51	puskomkref	2015	Ya	
52	Registrasi Tenaga Penunjang			Tidak
53	Rekap Pilkades			Tidak
54	rupabumi	2020		Tidak
55	Saran Aduan SIMDKT			Tidak

No	Nama Sistem Informasi	Tahun	Optimal	
			Ya	Tidak
56	SIAK	2020	Ya	
57	SIASMARA	2021	Ya	
58	SID			Tidak
59	sig-mapatda-bppkad	2017		Tidak
60	Simbada		Ya	
61	SIMBOS	2020		Tidak
62	SIMKB	2020		Tidak
63	SIMPAS	2021	Ya	
64	simpeg	2017	Ya	
65	simpelbangda	2021	Ya	
66	SIMPKK	2020		Tidak
67	SIMPUS	2017	Ya	
68	SIMRS	2020	Ya	
69	simwasda.inspektorat	2017	Ya	
70	Sinkronisasi Vaksin	2021	Ya	
71	SIPD	2017		Tidak
72	Sipemdes	2021		Tidak
73	SIPT			Tidak
74	SIPT Upload	2021	Ya	
75	Siskeudes		Ya	
76	Sistem informasi Koperasi (Sinkop)			Tidak
77	Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)	2020		Tidak
78	Sistem Informasi Pendataan Industri (Sinpi)			Tidak
79	sms	2019	Ya	
80	Temanggung Bebas Sampah	2021		Tidak
81	Temanggung Bebas Sampah Android	2021		Tidak
82	temanggungkab.go.id		Ya	
83	web puskesmas		Ya	
84	Website Corona	2020	Ya	
85	Website Dinbudpar	2021		Tidak
86	Website Dindikpora	2018	Ya	
87	Website Dinsos		Ya	
88	Website Disdukcapil	2017	Ya	
89	website kecamatan		Ya	
90	Website OPD		Ya	
91	Website Temanggung TV		Ya	
92	Online Single Submission (OSS)		Ya	
93	Sirup		Ya	
94	Sanapati		Ya	
95	SAPK		Ya	
96	SI JARI ON AKD		Ya	
97	P-Care		Ya	
98	Siap Pakde	2021	Ya	
99	E Pak Guru	2022	Ya	
100	Pesan Perak	2022	Ya	
101	SIM PBJ	2022	Ya	
JUMLAH			69	31

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2022

4. Indikator Program Bidang Statistik

a. Cakupan ketersediaan data makro daerah

Tersedianya data statistik yang menggambarkan kondisi makro daerah sangat penting untuk kemajuan daerah, karena data tersebut digunakan sebagai bahan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah. Ketersediaan data-data tersebut didukung dengan adanya data statistik sektoral yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta data statistik dasar yang menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS). Produk data statistik dasar meliputi Nilai Tukar Petani (NTP), Laju Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, Indeks Williamson, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan lain sebagainya. Sedangkan produk data statistik sektoral meliputi Statistik Kabupaten Temanggung, Bank Data Pembangunan dan lain sebagainya.

Jenis data makro daerah yang ditentukan menjadi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Temanggung sejumlah 5 (lima) yaitu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Ketimpangan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia.

Cakupan ketersediaan data makro daerah diperoleh dengan cara menghitung jumlah data makro yang tersedia dibagi kebutuhan data makro yang menjadi kebutuhan daerah di kali seratus persen.

Tabel 2.30
Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Data makro yang tersedia	7	7	5	5	6	5
2	Kebutuhan data makro	6	6	5	5	6	5
3	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah	85,7 %	87 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa cakupan ketersediaan data makro pada tahun 2022 sebesar 100%. Untuk tahun 2022 terdapat 5 (lima) data makro daerah yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Ketimpangan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia.

Faktor pendorong capaian kinerja Cakupan ketersediaan data makro daerah adalah sinergitas kerja sama Dinkominfo dan BPS Temanggung dan ketersediaan data disetiap OPD dilingkup Pemkab Temanggung.

Faktor penghambat capaian indikator kinerja ini adalah bahwa data tersebut dihasilkan melalui kegiatan statistik dasar yang merupakan kewenangan BPS Kabupaten Temanggung, sehingga ketersediaanya menunggu rilis data dari instansi tersebut.

Adapun detail ketersediaan data makro Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Detail Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2017-2022

No	Jenis Data	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
3	Pertumbuhan Ekonomi	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
4	Pendapatan per kapita	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
5	Indeks Ketimpanan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
	TOTAL	5	5	5	5	5	5

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2022

5. Indikator Program Bidang Persandian

a. Tingkat Kesiapan Penilaian/Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi

Paradigma persandian telah berubah, tidak hanya kirim berita namun lebih strategis yakni dalam ketersediaan, kerahasiaan, keutuhan data pada era keterbukaan informasi saat ini, yaitu melalui tata kelola keamanan informasi. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, otentikasi, nirsangkal, dan otorisasi terhadap sebuah informasi. Keamanan informasi mencakup keamanan fisik berupa keamanan infrastruktur dan keamanan logis berupa keamanan dalam bentuk digital.

Dalam pembangunan suatu aplikasi berbasis *web*, perlu dilakukan pengujian berdasarkan tingkat kualitas dan keamanannya. Kualitas sebuah aplikasi ditentukan oleh dua faktor yaitu *bugs* (aplikasi tidak bisa memenuhi sebagian spesifikasi kebutuhan yang sudah disepakati dan *security vulnerability*. Aplikasi memiliki fungsi yang tidak diinginkan).

Aplikasi berbasis *web* memiliki banyak potensi risiko keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Potensi keamanan dari aplikasi dapat diketahui dengan melaksanakan *IT Security Assessment*, yaitu pengujian terhadap sistem keamanan yang telah diterapkan pada suatu sistem. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya celah keamanan dalam aplikasi tersebut.

Tingkat Kesiapan penilaian/pengelolaan risiko keamanan informasi adalah persentase sistem elektronik yang telah diidentifikasi kerentanan dan risikonya sesuai prosedur dan standar untuk menghitung indikator outputnya dengan rumus yang sudah dibuat dan ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yaitu persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko dibagi jumlah sistem elektronik yang ada dikali seratus persen.

Tabel 2.32
Tingkat Penilaian Persiapan/Pengelolaan Resiko
Keamanan Informasi di Kabupaten Temanggung
Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko	n.a	5	3	4	7	4
2	Jumlah sistem elektronik	n.a	456	461	507	512	100
3	Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi	n.a	1,1 %	0.6 %	0.7 %	1.3 %	4 %

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2022

Berdasarkan Tabel 2.32 diatas dapat dilihat tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi mulai tahun 2018. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yaitu dengan melakukan Security Assessment.

Faktor Pendorong Pencapaian target Pengelolaan resiko keamanan informasi adalah adanya kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara serta Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan Assessment Keamanan Informasi di kabupaten Temanggung dengan Anggaran dari BSSN dan Provinsi Jawa Tengah.

Faktor Penghambat untuk Pengelolaan resiko kewanaman Informasi adalah keterbatasan Peralatan (Tidak adanya Komputer/laptop yang dengan spesifikasi memadai yang dapat digunakan untuk melaksanakan Pentest terhadap sistem atau aplikasi Pemerintah Daerah, serta keterbatasan kemampuan SDM Persandian dan Keamanan informasi yang dapat melakukan kegiatan tersebut.

Data dukung terkait tingkat penilaian persiapan/ pengelolaan resiko keamanan informasi disajikan pada Tabel-tabel berikut:

Tabel 2.33
Data Sistem Elektronik di Kabupaten Temanggung

No	Nama Sistem Elektronik	Jml Aplikasi	Jml duplikasi	Keterangan
1	Apdul (Schedule)	1	1	Aplikasi untuk melakukan pengaturan schedule kegiatan
2	Aplikasi Android Kependudukan Temanggung Gadem Pol	1	1	Aplikasi android untuk pelayanan kependudukan
3	Aplikasi Android Temanggung Gadem	1	1	Aplikasi android yang menampilkan data dan informasi serta pelayanan publik di Temanggung
4	Aplikasi ANJAB dan ABK	1	1	Aplikasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
5	Aplikasi Dashboard Geospasial	1	1	Aplikasi dashboard yang menampilkan informasi berbasis geospasial

No	Nama Sistem Elektronik	Jml Aplikasi	Jml dupli-kasi	Keterangan
6	Aplikasi Pendataan Pemudik	1	1	Aplikasi untuk pendataan pemudik Temanggung
7	Aplikasi Rusunawa	1	1	Sistem informasi dan Aplikasi pembayaran Rusunawa
8	Aplikasi SANKA Android	1	1	Aplikasi Santunan Kematian berbasis Android
9	Aplikasi SANKA Web	1	1	Aplikasi Santunan Kematian berbasis Website
10	Bankdata	1	1	Sistem Informasi / Aplikasi Dari Pemerintah (daerah) Terkait Dengan Kumpulan Data Data / Aset Penting Di Pemerintah Kabupaten Temanggung
11	Biblioteka Dinarpus	1	1	Portal Sistem Informasi katalog buku Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
12	BKPSDM	1	1	Portal Sistem Informasi BKPSDM
13	Cellplan	1	1	Sistem Informasi Pengecekan Koordinat cellplan Menara Telekomunikasi Kabupaten Temanggung
14	Dashboard Dinkes	1	1	Halaman Dashboard Dinas Kesehatan
15	Dashboard SIMPUS	1	1	Gabungan Data Transaksi Layanan Kesehatan pada SIMPUS se-Kabupaten Temanggung
16	data	1	1	portal untuk menjembatani pengambilan data dari Bank Data Pembangunan ke Aplikasi Gandem
17	Data Kemiskinan Daerah (Santunan Kematian)	1	1	Sistem Informasi Santunan Kematian Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
18	e-Bumdes	1	1	Sistem Informasi Badan Usaha Milik Desa
19	e-dokum (katalog dokumen hukum)	1	1	aplikasi yang menampilkan katalog dokumen hukum/ peraturan
20	E-Keuangan	1	1	Layanan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik
21	e-kinerja	1	1	aplikasi manajemen kinerja pegawai
22	e-monev	1	1	Aplikasi monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan
23	E-Office	1	1	Aplikasi Surat Elektronik dan Pengelolaan Kearsipan
24	e-peluk ASN	1	1	aplikasi pelayanan keluhan ASN
25	e-risalah	1	1	Aplikasi Tentang Pengelolaan Risalah DPRD Kabupaten Temanggung
26	E-Rretribusi Pasar	1	1	Retribusi Pasar integrasi db dengan aplikasi Simpas
27	e-Statistik	1	1	Sistem Informasi / Aplikasi Penyaji Data Statistik Kab. Temanggung Untuk Membantu Memudahkan Pengguna Mengakses Data Secara Cepat Dan Mudah

No	Nama Sistem Elektronik	Jml Aplikasi	Jml dupli-kasi	Keterangan
28	E-Surat RSUD	1	1	Surat Keluar masih manual, API WA ikut wablas RSUD
29	e-TPP	1	1	istem Informasi / Aplikasi Untuk Mendata Tunjangan Pokok Pegawai Di Kabupaten Temanggung
30	Evarenbang	1	1	SISTEM INFORMASI EVALUASI MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN
31	Gabungan Data (Gadem)	1	1	Sistem Informasi Pusat Data Terpadu (Gabungan Data Temanggung)
32	Gis Tata Ruang	1	1	sistem proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Temanggung yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang di Kabupaten Temanggung
33	Hebat	1	1	Website himpunan berita Temanggung (Humas)
34	jdih	1	1	Aplikasi yang menampilkan dokumentasi dan informasi hukum
35	Kejari	1	1	Website Kejaksaan Negeri
36	Laporan Kinerja Kecamatan	1	1	Aplikasi Pencatat Kinerja Kecamatan pada Pemerintahan Kab. Temanggung
37	Layanan 24/7	1	1	Sistem Informasi Layanan 24/7
38	layanan kependudukan online	1	1	Aplikasi Pelayanan Kependudukan secara Online
39	LPSE	1	1	Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
40	mail	1	1	Aplikasi Email Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung
41	mapatda	1	1	Sistem Informasi / Aplikasi Tentang Pelayanan Pajak Daerah Berbasis Kinerja Integrasi Data
42	media center	1	1	Website Resmi Media Center Kabupaten Temanggung
43	monitorabsen (E-Absensi)	1	1	Sistem Informasi untuk melakukan monitoring absensi pegawai
44	NMS	1	1	Aplikasi untuk memonitoring jaringan
45	paten-kecamatan	1	1	Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
46	Portal Sistem Informasi	1	1	Portal kumpulan semua Sistem Informasi / Aplikasi yang terdata di Kabupaten Temanggung
47	Portal VPN dan SSO	1	1	Portal Aplikasi terintegrasi yang menerapkan teknologi VPN
48	PPDB Online	1	1	Portal Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Temanggung
49	PPID Pembantu	1	53	Website resmi PPID Pembantu di Kabupaten Temanggung
50	PPID Utama	1	1	Aplikasi PPID Utama Pemkab Temanggung

No	Nama Sistem Elektronik	Jml Aplikasi	Jml dupli-kasi	Keterangan
51	puskomkref	1	1	Website puskomkref
52	Registrasi Tenaga Penunjang	1	1	Aplikasi Registrasi Tenaga Penunjang Kabupaten Temanggung
53	Rekap Pilkades	1	1	aplikasi untuk rekap cepat Pemilihan Kepala Desa di Kab. Temanggung
54	rupabumi	1	1	Aplikasi untuk mempermudah pendataan Cagar Budaya di Kabupaten Temanggung
55	Saran Aduan SIMDKT	1	1	Sistem Informasi / Aplikasi Dari Pemerintah (daerah) Terkait Dengan Pelaporan Saran Dan Aduan Informasi Data Kemiskinan Yang Ada Di Kabupaten Temanggung
56	SIAK	1	1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
57	SIASMARA	1	1	Persuratan Dinkes
58	SID	1	289	Sistem Informasi Desa dan Kelurahan
59	sig-mapatda-bppkad	1	1	Aplikasi Manajemen Pendapatan Daerah berbasis Peta
60	Simbada	1	1	Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) untuk mengelola Aset di masing-masing instansi
61	SIMBOS	1	1	Sistem Informasi Bantuan Operasional Sekolah
62	SIMKB	1	1	Aplikasi untuk mengelola data keluarga berencana
63	SIMPAS	1	1	aplikasi transaksi pasar
64	simpeg	1	1	Aplikasi manajemen kepegawaian
65	simpelbangda	1	1	Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Daerah
66	SIMPKK	1	1	Aplikasi pencatat data PKK
67	SIMPUS	1	26	Sistem Informasi Puskesmas
68	SIMRS	1	1	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
69	simwasda.inspektorat	1	1	Sistem Informasi Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung (SIMWASDA)
70	Sinkronisasi Vaksin	1	1	Capaian data vaksinasi (import data excel kependudukan dan KPCPEN dinkes)
71	SIPD	1	1	Sistem Informasi / Aplikasi yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan
72	Sipemdes	1	1	Sistem Informasi Perangkat Desa
73	SIPT	1	1	Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) Dinas Kesehatan
74	SIPT Upload	1	1	Aplikasi alternatif upload data SIPT (Anak, Ibu, Gizi)
75	Siskeudes	1	1	Sistem Informasi Keuangan Desa

No	Nama Sistem Elektronik	Jml Aplikasi	Jml dupli-kasi	Keterangan
76	Sistem informasi Koperasi (Sinkop)	1	1	Sistem Informasi Koperasi
77	Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)	1	1	Sistem Informasi untuk mengelola Objek Pajak
78	Sistem Informasi Pendataan Industri (Sinpi)	1	1	Sistem Informasi untuk Pendataan Industri
79	sms	1	1	Aplikasi pengaduan melalui SMS Gateway
80	Temanggung Bebas Sampah	1	1	Sistem aplikasi pencatat data rekap dan pelaporan sampah
81	Temanggung Bebas Sampah Android	1	1	Sistem Aplikasi Pelaporan dan Pendataan Sampah
82	temanggungkab.go.id	1	1	Sebuah Portal website Kabupaten Temanggung
83	web puskesmas	1	26	Website Resmi Pusat Kesehatan Masyarakat
84	Website Corona	1	1	Memaparkan informasi sebaran virus corona perkecamatan (integrasi dengan Corona Jateng)
85	Website Dinbudpar	1	1	Website + Administrasi
86	Website Dindikpora	1	1	Website Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
87	Website Dinsos	1	1	Website Dinas Sosial
88	Website Disdukcapil	1	1	Website Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil
89	website kecamatan	1	20	Website resmi Kecamatan
90	Website OPD	1	22	Website resmi OPD
91	Website Temanggung TV	1	1	Website resmi Temanggung TV
92	Online Single Submission (OSS)	1	1	Aplikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
93	Sirup	1	1	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
94	Sanapati	1	1	Surel ekstra pengamanan dari BSSN
95	SAPK	1	1	Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian
96	SI JARI ON AKD	1	1	Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi
97	P-Care	1	1	Layanan pasien BPJS
98	Siap Pakde	1	1	Sistem Informasi Pendapatan Pajak Daerah
99	E-pak Guru	1	1	Sistem Informasi untuk penilaian angka kredit guru di Kabupaten Temanggung
100	Pesan Perak	1	1	Sistem informasi untuk pengaduan kekerasan perempuan dan anak
	Jumlah	100	530	

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2022

Tabel 2.34
 Hasil TT *Security Assesment* oleh BSSN di Kabupaten
 Temanggung

No	Asal OPD	Nama	Alamat	Tingkat Resiko	Tahun Assesment
1	Bappeda	e-planning	e-planning.temanggungkab.go.id	Sedang	2019
2	BKPSDM	e-tp	e-tp.temanggungkab.go.id	Tinggi	2019
3	BPPKAD	Mapatda	http://bppkad-online.temanggungkab.go.id/mapatda-bppkad/	Sedang	2019
4	Dinhub	Ujikir		Tinggi	2019
5	BKPSDM	e-kinerja	Kinerja.temanggungkab.go.id	Tinggi	2019
6	Dinkominfo	kominfo	Kominfo.temanggungkab.go.id	sedang	2020
7	Dinkominfo	Jurnalbhumi phala	Jurnalbhumi phala.temanggungkab.go.id	sedang	2020
8	Dinkes	simpus	simpus.temanggungkab.go.id	Sedang	2021
9	dindikpora	simbos	simbos.temanggungkab.go.id	Sedang	2021
10	Dinas Kominfo	gandem	gandem.temanggungkab.go.id	Sedang	2021
11	Bappeda	simdkt	simdkt.temanggungkab.go.id	Sedang	2021
12	Bag. Organisasi	e-kinerja	e-kinerja.temanggungkab.go.id	Sedang	2021
13	BKPSDM	simpeg	simpeg.temanggungkab.go.id	Sedang	2021
14	Dinas Kominfo	Bankdata	Bankdata.temanggungkab.go.id	Sedang	2021
15	Dinas Dukcapil	Temanggung Gandem POL	Dindukcapil.temanggungkab.go.id/Pelayanan	Tinggi	2022
16	Dinas Sosial	E-Sanka	Dinsos.temanggungkab.go.id/santunan/santunan	tinggi	2022
17.	BPPKAD	Perbendaharaan	Keuangan.temanggungkab.go.id/perbendah	tinggi	2022
18	BPPKAD	Simpelbangda	Simpelbangda.temanggungkab.go.id	tinggi	2022

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2022

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinkominfo dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target Renstra 2019-2023, serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinkominfo dari 9 indikator terdapat 4 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain :
 - a. Persentase PPID badan publik yang aktif
Penyebabnya antara lain:
 - Masih belum kuatnya kesadaran di tingkat PPID Badan Publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, juga kendala keterbatasan kompetensi SDM pelaku PPID.
 - Keterbatasan kompetensi SDM pelaku PPID pembantu.
 - b. Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif
Hal ini disebabkan karena belum masifnya para pengelola KIM dalam melakukan pendokumentasian dan pelaporan kegiatan.
 - c. Persentase ketersediaan akses internet publik
Penyebabnya adalah karena keterbatasan bandwidth yang akan didistribusikan di ruang publik, keterbatasan anggaran serta sapsras pendukung di area publik (kelistrikan dan keamanan alat).
 - d. Persentase ketersediaan jaringan intranet
Hal ini disebabkan karena sebagian desa ada yang memiliki akses internet dari penyedia jasa lain karena sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan usaha.
 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo, antara lain:
 - a. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Masalah ini disebabkan karena banyaknya sistem informasi yang belum difungsikan dan dikelola dengan baik, yang menjadi akar permasalahannya antara lain:
-

- Masih rendahnya sistem informasi yang dapat berfungsi optimal.
 - Belum adanya standar baku pengelolaan sistem informasi.
- b. Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah, karena banyaknya sistem informasi yang belum bisa diintegrasikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
- Banyaknya sistem informasi yang dibuat dengan standar data dari pengembang yang berbeda-beda.
 - Belum adanya standar baku pembangunan dan pengembangan sistem informasi.
- c. Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi di tingkat desa di Kabupaten Temanggung. Hal ini terjadi karena ketersediaan jaringan internet dan intranet belum dapat memenuhi kebutuhan hingga tingkat pemerintah desa. Yang menjadi penyebab masalah antara lain:
- Masih minimnya infrastruktur jaringan internet dan sarana prasarana pendukung jaringan yang disebabkan karena faktor geografi dan jangkauan tenaga listrik yang jauh.
 - Terbatasnya SDM yang memiliki keahlian dibidang teknis jaringan.
- d. Belum tersedianya data statistik dasar pada tahun berjalan. Hal ini disebabkan karena ketersediaan data makro daerah masih terkait dengan pihak instansi vertikal selaku pengolah data yang mempunyai kewenangan sesuai undang-undang yang berlaku, serta ketersediaan data sektoral masih belum efisien karena belum adanya sistem keterpaduan data.
- e. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat keamanan informasi di lingkup pemerintah daerah.

Dengan memperhatikan permasalahan diatas, maka dalam urusan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renja berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi antara lain:

1. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan menjadi sebuah wujud tata kelola pemerintahan kearah yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal ini tentu saja menuntut agar semua instansi bertindak sebagai penggerak utama SPBE di daerah dan instansi masing-masing dengan mengambil langkah-langkah konkrit yang berorientasi hasil.

Dengan adanya kebijakan ini, SPBE akan memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan. Selain itu, juga untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, serta menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dan KKN.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Dinkominfo Kabupaten Temanggung melalui Bidang Informatika berkomitmen untuk mewujudkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komukasi (TIK) serta pembangunan SPBE di Kabupaten Temanggung. Aspek yang menjadi prioritas diantaranya adalah aspek sinergitas kelembagaan, pemantapan infrastruktur, dan peningkatan sumberdaya aparatur pelaksana.

2. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka semua badan/instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-

prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Dalam hal ini Dinkominfo Kabupaten Temanggung melalui Bidang Komunikasi berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas informasi publik.

3. Penyediaan data statistik daerah melalui single data

Penyusunan dan pengambilan suatu kebijakan pembangunan daerah tidak bisa terlepas dari tersedianya data, karena bila kebijakan yang ditetapkan tidak berdasarkan data maka akan berakibat pada ketidak sesuaian kebijakan dengan kondisi yang sebenarnya.

Tujuan penyajian data adalah memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, sehingga data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data, dan membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinkominfo Kabupaten Temanggung melalui Bidang Statistik dan Persandian mempunyai strategi untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral melalui single data sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Temanggung.

4. Keamanan Informasi

Keamanan informasi adalah kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan dan ketersediaan teknologi.

Keamanan informasi saat ini menjadi suatu hal yang sangat penting dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan TIK memberi manfaat yang sangat banyak karena meningkatkan kualitas pelayanan dan percepatan kinerja, namun disisi lain tercipta ancaman dan gangguan terhadap

informasi yang ada. Pentingnya keamanan informasi pada suatu sistem informasi merupakan salah satu tuntutan maupun tantangan bagi seluruh instansi pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinkominfo Kabupaten Temanggung melalui Bidang Statistik dan Persandian mempunyai strategi meningkatkan indeks keamanan informasi sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga terwujud efektifitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

- a. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal Dinkominfo yaitu sejumlah 2 (dua) sub. kegiatan yaitu:
 - 1) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 - 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.
- b. Penambahan pagu anggaran yang semula sebesar Rp. 9.451.048.198,- bertambah sebesar Rp. 7.604.954.145 menjadi sebesar Rp. 17.175.527.343.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.32 berikut:

Tabel 2.34
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.026.768.083		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.026.725.483	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.456.618.083		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.456.618.083	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	32	Orang per bulan	3.456.618.083		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	32	Orang per bulan	3.456.618.083	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					342.500.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					342.500.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Temanggung	5000	orang	342.500.000		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Temanggung	5000	orang	342.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					139.000.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah					138.958.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung	5	Paket	5.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung	5	Paket	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersediaanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	6	Paket	46.500.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersediaanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	6	Paket	46.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	3	Paket	16.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	3	Paket	16.000000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Temanggung	2	Paket	9.500.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Temanggung	2	Paket	9.500.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	12	Laporan	28.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	12	Laporan	27.982000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	36	Laporan	34.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	36	Laporan	33.978.500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					120.650.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					120.648.900	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	12	Laporan	3.150.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	12	Laporan	3.150.0000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	12	Laporan	7.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	12	Laporan	7.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	12	Laporan	11.500.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	12	Laporan	11.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	42	Laporan	99.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	42	Laporan	98.998.900	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					68.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					68.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Temanggung	26	Unit	68.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Temanggung	26	Unit	68.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					3.535.570.815		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					4.035.570.815	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					3.535.570.815		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					4.035.570.815	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Temanggung	12	Dok	3.306.363.500		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Temanggung	12	Dok	3.506.363.500	
	Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Temanggung	12	Dok	153.148.000		Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Temanggung	12	Dok	153.148.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Temanggung	150	Orang	76.059.315		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Temanggung	150	Orang	376.059.315	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.778.578.624		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					8.795.873.360	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1.514.662.360		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1.514.661.860	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	1	Dok	32.000.000		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	1	Dok	31.999.500	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam	Kab. Temanggung	2	Unit	1.482.662.360		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam	Kab. Temanggung	2	Unit	1.482.662.360	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					216.213.940		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					7.281.211.500	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Temanggung	20	Unit	54.322.300		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Temanggung	20	Unit	119.322.300	
								Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Temanggung	10	Unit	79.622.800	
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan <i>Masterplan Smart City</i>	Kab. Temanggung	12	Dok	82.266.984		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan <i>Masterplan Smart City</i>	Kab. Temanggung	12	Dok	82.266.400	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung	-		-		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung	12	Dok	7.000.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					127.833.000		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					127.833.000	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					127.833.000		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					127.833.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Temanggung	3	Dok	80.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Temanggung	3	Dok	100.000.000	
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kab. Temanggung	2	Dok	27.833.000		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kab. Temanggung	2	Dok	27.833.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					50.000.000		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					70.000.000	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					50.000.000		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					70.000.000	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	26	OPD	50.000.000		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	26	OPD	20.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	-							Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Temanggung	1	Dok	50.000.000	
TOTAL						9.451.048.198	TOTAL						17.056.002.343	

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.35
Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Anggaran (Rp)
1	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kecamatan Kedu	Terselenggaranya Operasional dan Pelatihan TIK Kepada Masyarakat di Kecamatan Kedu	1 paket	200.000.000
2	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kecamatan Jumo	Terlaksananya pelatihan komputer dan pengelolaan website di Kecamatan Jumo	1 paket	100.000.000

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Dinkominfo Kabupaten Temanggung malakukan inovasi kerja yang dalam pelaksanaannya berjalan cukup efektif. Hal itu sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan memberikan akses kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi yang sudah diterapkan dan sedang dalam persiapan untuk menunjang kinerja Dinkominfo adalah sebagai berikut:

a. E-statistik

E-statistik adalah publikasi data statistik sektoral Kabupaten Temanggung dalam bentuk digital yang yang dapat diakses untuk kepentingan pemerintah sebagai dasar perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan, disamping itu dan juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mencari informasi mengenai data statistik. Aplikasi ini terdiri dari dua jenis yaitu *e-statistik* berbasis web yang berisikan data-data statistik sektoral dalam bentuk rekapitulasi dan *e-statistik* yang berbasis android merupakan aplikasi mobile yang dapat diakses lewat *gadget* yang berisikan data-data statistik sektoral dari OPD, instansi vertikal dan instansi swasta dilingkup Kabupaten Temanggung.

b. Mobile city branding

Mobile city branding merupakan suatu media informasi dan pelayanan terpadu, yaitu sebuah portal informasi untuk publik yang dapat diakses terpadu satu platform, dari dalam (internal) atau luar (eksternal) bagi organisasi. Dengan platform informasi dan pelayanan publik yang terpadu, masyarakat dapat memperoleh informasi pelayanan publik, potensi daerah, informasi pariwisata, dan informasi lainnya yang resmi dari pemerintah Kabupaten Temanggung.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat telah memaksa organisasi untuk membangun berbagai fasilitas teknologi sistem informasi sebagai tulang punggung utama dalam mengembangkan sebuah sistem informasi organisasi yang handal dan berkualitas. Salah satu tolok ukur kematangan pengembangan e-government di suatu daerah adalah dengan adanya layanan informasi dan pelayanan publik yang terpadu dan terintegrasi, dengan menerapkan interoperabilitas antar sistem yang akan membantu proses pengumpulan informasi dan pelayanan antar OPD. Penerapan aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan.

c. SiMonev KIP

Sistem Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (SiMONEV-KIP) PPID Kabupaten Temanggung adalah aplikasi untuk memfasilitasi, memonitor, mengklasifikasi dan memverifikasi updating data dan informasi PPID Badan Publik di Pemkab Temanggung.

Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah PPID Badan Publik dalam melaksanakan update informasi, karena dengan aplikasi ini informasi-informasi yang belum dan sudah terupdate dapat secara realtime diketahui.

Dari sisi PPID utama aplikasi juga sangat membantu dalam memantau keaktifan PPID Badan Publik serta mempermudah dan mempercepat dalam mengupdate informasi lingkup Pemkab yang dimiliki, dikelola, dan dikuasai oleh PPID Badan Publik. Misalnya dokumen penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 yang menjadi tanggungjawab PPID BPKPAD akan segera dapat terupload manakala PPID BPKPAD sudah mengupload melalui aplikasi ini.

d. Saka Milenial

Satuan Karya Pramuka Mitra Inovasi dan Literasi Teknologi Informatika Digital (Saka Milenial) merupakan wadah pembinaan bagi Pramuka Penegak dan Pandega yang menyukai kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi terutama bidang pengembangan teknologi komputer membuka kesempatan bagi Pramuka Penegak dan Pandega untuk mengikuti kegiatan Pengembangan Teknologi Komputer dengan Krida-krida yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan.

Terdapat 5 Krida yang dapat dipilih bagi Pramuka Penegak dan Pandega yang akan menggeluti Teknologi Informatika yaitu:

- 1) Literasi Digital Dan Internet.
- 2) Kreasi Animasi Dan Multimedia.
- 3) Inovasi Perangkat Lunak.
- 4) Telemetri dan Robotika.
- 5) Teknologi Jaringan dan Big Data

Dengan adanya Saka Milenial ini diharapkan dapat meningkatkan literasi digital bagi anggota muda dalam pemanfaatan teknologi dan informasi.

e. Implementasi sertifikat elektronik

Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam melakukan transaksi elektronik yang diperlukan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik merupakan salah satu cara memberikan jaminan keamanan transaksi elektronik dalam mendukung tata pemerintah dan cukup praktis karena kita tidak perlu membawa banyak materiil untuk melakukan tanda tangan digital ataupun menambahkan sertifikat digital pada suatu dokumen, namun cukup membawa sebuah token ataupun *dongle*.

Sertifikat elektronik memberikan jaminan otentikasi data karena sertifikat digital dapat menunjukkan langsung pemilik dari sertifikat di dalam suatu dokumen, kemudian integritas karena pada sertifikat elektronik menjamin keutuhan data dengan melihat apakah ada suatu perubahan di dalam dokumen yang telah ditandatangani, dan anti penyangkalan karena dapat langsung dibuktikan waktu

penandatanganan serta dapat menyangkal pemalsuan dari suatu keutuhan data.

Inovasi yang telah dilaksanakan dan sedang dalam persiapan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.36
Daftar Inovasi Perangkat Daerah Tahun S.d 2022

No	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	E-statistik	Dinkominfo Kab. Temanggung	APBD	Pembuatan Aplikasi statistik	Aplikasi statistik berbasis web	Kemudahan akses informasi statistik kabupaten	Dinkominfo-2019
2	Mobile city branding	Dinas Kominfo Kab. Temanggung	APBD	Portal informasi publik terpadu	Portal informasi untuk publik yang dapat diakses terpadu satu platform	Kemudahan akses informasi publik	Dinkominfo-2019
3	SiMonev	Dinkominfo Kab. Temanggung	APBD		Aplikasi untuk memfasilitasi, memonitor, mengklasifikasi dan memverifikasi updating data dan informasi PPID Badan Publik	Kemudahan akses informasi	Dinkominfo-2021
4	Saka Milenial	Dinkominfo Kab. Temanggung	APBD	Pembentukan saka milenial binaan	Wadah pembinaan bagi Pramuka Penegak dan Pandega pegiat Teknologi Informasi Komunikasi	Terbentuknya saka melineal kwarcab Temanggung sebagai mitra Pemerintah daerah dalam penyebaran informasi	Dinkominfo-2020
5	Implementasi sertifikat elektronik	Dinkominfo Kab. Temanggung	APBD	Pembuatan tanda tangan digital	Tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam melakukan transaksi	Efisiensi kinerja	Dinkominfo-2019

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Prestasi dan penghargaan yang diraih Dinkominfo Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.37
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2022

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun	Skala	Keterangan
1	Piagam Penghargaan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020	Komisi Informasi Publik Propinsi Jawa Tengah	2020	Regional	
2	Piagam Penghargaan Peningkatan Media Center Daerah Tingkat Nasional Tahun 2019	Kemkominfo	2020	Nasional	Kontribusi aktif dalam produksi foto pada portal berita infopublik.id
3	KIP Award Peringkat IX	Komisi Informasi Publik Propinsi Jawa Tengah	2021	Regional	Kategori "Menuju Informatif"
4	Juara II Seleksi Pertunjukan Rakyat FK Metra Tingkat Prop. Jateng	Dinkominfo Prop. Jawa Tengah	2021	Regional	
5	Dukungan kerjasama dan kontribusi dalam penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Temanggung	Bupati Temanggung	2021	Kabupaten	
6	Penghargaan peningkatan keterbukaan informasi publik Tahun 2022	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	2022	Regional	Kategori "Menuju Informatif"

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun	Skala	Keterangan
7	Penghargaan, ERTE FM Temanggung Jateng Terbaik I Kategori Radio Ramah Anak	Persatuan Radio LPPL se-Indonesia (Persada)	2022	Nasional	
8	Anugrah Penyiaran Jawa tengah 2022, LPPL Radio ERTE FM Juara I Lembaga Penyiaran Publik Lokal Terbaik 2022		2022	Regional	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinkominfo Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinkominfo lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Dinkominfo Kabupaten Temanggung.

Perencanaan Program dan kegiatan pada Dinkominfo Kabupaten Temanggung merujuk pada sasaran dan Kebijakan Kemenkominfo untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Dalam Rencana Strategis Kemenkominfo 2020-2024 disebutkan bahwa dalam mendukung kebijakan nasional Kemenkominfo fokus untuk mendukung mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai *supply*), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi *demand*). Pandemi *Covid-19* yang terjadi di tahun 2020, mendorong munculnya desakan untuk mempercepat ketersediaan akses internet *broadband* ke seluruh wilayah Indonesia, dan percepatan digitalisasi di semua sektor.

Arah kebijakan Kemenkominfo antara lain:

1. Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik;
2. Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan;
3. Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital;
4. Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan;
5. Mempercepat penyelesaian legislasi primer;

6. Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah;
7. Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika Kemenkominfo meliputi :

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas *Next Generation Broadband Nasional*;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis ;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital dan Komunikasi;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelaksana dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, baik ditingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan yang diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari tingkat daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi, serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2024, maka tujuan Dinkominfo Kabupaten Temanggung adalah:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi; dan

2. Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.

Sedangkan sasaran Dinkominfo Kabupaten Temanggung adalah:

1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik; dan
2. Meningkatnya kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinkominfo Kab. Temanggung pada Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Program
Pada Dinkominfo Kabupaten Temanggung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Satuan Target	Target Tahun 2024	Target Kondisi Akhir 2026
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik			Nilai	89,95	90,35
				Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	Persen	35	45
					Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	Persen	100	100
					Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	Persen	85	100
Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Ketersediaan data statistik sektoral	Persen	100	100				
2	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			Nilai	3,20	3,50
				Program Aplikasi Informatika	Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	Persen	100	100
					Persentase layanan publik secara elektronik	Persen	50	60
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase penilaian resiko keamanan informasi	Persen	33,3	100
Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah	Persen	30	100					

Kebijakan dan strategi Dinkominfo Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinkominfo Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinkominfo Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinkominfo Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Dinkominfo Tahun 2024 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2024.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinkominfo Tahun 2024 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 4.1
Perbandingan Program dan Kegiatan
Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	-+Pagu Indikatif
1	2	7	1	2	7	8
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.026.768.083		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.026.725.483	- 42.600
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.456.618.083		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.456.618.083	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.456.618.083		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.456.618.083	-
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	242.500.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	242.500.000	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	242.500.000		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	242.500.000	-
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	139.000.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.958.500	- 41.500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.500.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.498.000	2.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.000.000	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.500.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.500.000	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.982.000	18.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.978.500	- 21.500
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.650.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.648.900	- 1.100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.150.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.150.000	-

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.500.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.000.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.000.000
B	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.535.570.815
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.535.570.815
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.306.363.500
	Pelayanan Informasi Publik	153.148.000
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	76.059.315
C	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.778.578.624
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.514.662.360
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.000.000
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.482.662.360
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	216.213.940
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	54.322.300

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.000.000	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.500.000	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.998.900	- 1.100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.000.000	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.000.000	-
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.035.570.500	499.999.685
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.035.570.500	499.999.685
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.506.363.500	200.000.000
	Pelayanan Informasi Publik	153.148.000	-
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	376.059.000	299.999.685
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	8.915.398.360	7.136.819.736
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.514.661.860	- 500
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.999.500	- 500
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.482.662.360	-
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.400.736.500	7.184.522.560
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	119.322.300	65.000.000

				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	79.622.800	79.622.800
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	82.266.984		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	201.791.400	119.524.416
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	-		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	7.000.000.000	7.000.000.000
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	107.833.000		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	127.833.000	20.000.000
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	107.833.000		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	127.833.000	20.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	80.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	100.000.000	20.000.000
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	27.833.000		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	27.833.000	-
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	50.000.000		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	70.000.000	20.000.000
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	20.000.000
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	-30.000.000
	-			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	50.000.000	50.000.000
	JUMLAH	9.451.048.198		JUMLAH	17.175.527.343	7.604.954.145

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa rancangan Rencana Kerja Dinkominfo sudah mengacu pada program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinkominfo Kab. Temanggung
Tahun 2024

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Target Capaian Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.026.725.483					4.056.901.923
2	16	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.456.618.083					3.456.751.923
2	16	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	33 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai	3.456.618.083	DAU		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	3.456.751.923
2	16	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	242.500.000					255.000.000
2	16	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Temanggung	5000 orang	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat	242.500.000	DBHCHT		Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan		242.500.000
2	16	1	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah	138.958.500					154.500.000
2	16	1	2,1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	5 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000	DAU		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	5.000.000
2	16	1	2,1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	6 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	46.498.000	DAU		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	61.000.000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Target Capaian Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	16	1	2,1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	12 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya alat tulis kantor dan tinta komputer	16.000.000	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	17.000.000
2	16	1	2,1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	12 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya barang cetak dan fotocopy	9.500.000	DAU		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	9.500.000
2	16	1	2,1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	12 laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	27.982.000	DAU		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	28.000.000
2	16	1	2,1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	36 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	33.978.500	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 laporan	34.000.000
2	16	1	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan Perangkat Daerah	120.648.900					122.650.000
2	16	1	2,1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	36 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	3.150.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 laporan	3.150.000
2	16	1	2,1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening tagihan telepon	7.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	8.000.000
2	16	1	2,1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	24 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	11.500.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 laporan	12.500.000
2	16	1	2,1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	12 laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Terbayarnya honorarium 1 orang Tenaga Administrasi, 2 orang petugas kebersihan kantor, 1 orang tenaga kebersihan di balai wartawan, dan upah lembur pegawai	98.998.900	DAU		Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	99.000.000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Target Capaian Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	16	1	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Terpenuhinya kebutuhan penunjang kegiatan Perangkat Daerah	68.000.000					68.000.000
2	16	1	2,1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Temanggung	26 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya pembelian BBM, penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional, servis kendaraan dinas dan perpanjangan STNK	68.000.000	DAU	mobil 11 unit, sepeda motor 15 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 unit	68.000.000
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					4.035.570.500					4.035.570.815
2	16	2	2		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Tersampainya informasi publik melalui berbagai saluran komunikasi secara cepat, tepat, objektif, berkualitas dan mudah dimengerti, dalam rangka meningkatkan partisipasi publik dalam pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah.		4.035.570.500					4.035.570.815
2	16	2	2	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Temanggung	12 dokumen	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan Media Komunikasi Publik	Produksi dan Updating Konten Berita/Informasi melalui Portal Berita Milik Pemerintah Daerah (Website, Media Center, HEBAT, Media Sosial) Terlaksananya Penyiaran LPPL Temanggung TV dan	3.506.363.500	DAU		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan Media Komunikasi Publik		3.506.363.500

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)				
			Target Capaian Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
			1	2	3				4	5		6	7	8	9
2	16	2	2	6	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Temanggung	12 dokumen	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	LPPL Radio Temanggung, dan terealisasinya perbaikan tower RT FM	153.148.000	DAU		Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik		153.148.000
2	16	2	2	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Temanggung	150 orang	Jumlah Sumberdaya kamunikasi Publik yang meningkat kapasitasnya	Terselenggaranya Operasional dan Pelatihan TIK Kepada Masyarakat di Kecamatan Kedu, Rp. 200.000.000,- (M) Terlaksananya pelatihan komputer dan pengelolaan website di Kecamatan Jumo, Rp. 100.000.000,- (M)	376.059.000	DAU		Jumlah Sumberdaya kamunikasi Publik yang meningkat kapasitasnya	160 orang	376.059.315
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					8.915.398.360					1.740.876.300
2	16	3	2		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Tersedianya IP publik Pemerintah Kabupaten Temanggung, Website dan terstrukturnya domain OPD Kabupaten Temanggung (Sewa lisensi AS Number Pemkab.	1.514.661.860					1.514.662.360

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Target Capaian Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Temanggung, SSL, Domain Temanggung Kab, sewa akses bandwidht Data Center, OPD UPT desa/kelurahan dan internet publik (eGovernment), Lisensi Firewall, pemeliharaan Peralatan Jaringan.						
2	16	3	2	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	1 dokumen	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam peyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya IP publik Pemerintah Kabupaten Temanggung, Website dan terstrukturnya domain OPD Kabupaten Temanggung (Sewa lisensi AS Number Pembkab. Temanggung, SSL, Domain Temanggung Kab.)	31.999.500	DAU		Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam peyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	32.000.000
2	16	3	2	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung	2 unit sistem	Jumlah Sistem jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya sewa akses bandwidht Data Center, OPD UPT desa/kelurahan dan internet publik (eGovernment), tersedianya Lisensi Firewall, tersedianya pemeliharaan Peralatan Jaringan	1.482.662.360	DAU		Jumlah Sistem jaringan Intra Pemerintah Daerah	2 Sistem	1.482.662.360
2	16	3	2		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Terselenggaranya pengelolaan Data Center dan server jaringan komunikasi , pengelolaan sistem informasi, fasilitasi pembuatan dan	7.400.736.500					226.213.940

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2024							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)					
			Target Capaian Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
					pengembangan sistem informasi OPD Kabupaten Temanggung, terwujudnya integrasi sistem informasi Kabupaten Temanggung dan infrastruktur										
2	16	3	2	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Temanggung	20 Unit Server	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	Terselenggaranya pengelolaan Data Center dan server jaringan komunikasi online Pemerintah Kabupaten Temanggung	119.322.300	DAU		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	20 Unit Server	54.322.300
2	16	3	2	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Temanggung	10 aplikasi	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	Terselenggaranya pengelolaan sistem informasi, fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem informasi OPD Kabupaten Temanggung	79.622.800	DAU	4 aplikasi buat baru, dan 6 aplikasi pengembangan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	12 aplikasi	79.624.656
2	16	3	2	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kab. Temanggung	12 dokumen	Jumlah dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Terselenggarakannya pengelolaan egovernment / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab Temanggung, dan terwujudnya integrasi sistem informasi Kabupaten Temanggung dan infrastruktur	201.791.400	DAU		Jumlah dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	12 dokumen	82.266.984
2	16	3	2	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung	12 dokumen	Jumlah dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Teknologi Informasi dan	Tersedianya peralatan multi media pada kelompok masyarakat	7.000.000.000	DAU		Jumlah dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Teknologi Informasi dan		10.000.000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Target Capaian Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Komunikasi Pemerintah Daerah					Komunikasi Pemerintah Daerah		
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					127.833.000					127.833.000
2	20	2	2		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				Tersedianya data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan pembangunan dan satu data indonesia (SDI) Kabupaten Temanggung	127.833.000					127.833.000
2	20	2	2	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Temanggung	2 dokumen	Jumlah dokumen Koordinasi dan Singkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terwujudnya ketersediaan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan pembangunan	100.000.000	DAU	Dokumen yang disediakan berisi data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan pembangunan didaerah	Jumlah dokumen Koordinasi dan Singkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2 dokumen	100.000.000
2	20	2	2	6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kab. Temanggung	2 dokumen	Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun	Terwujudnya penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Temanggung	27.833.000	DAU	Dokumen yang disediakan sebagai layanan pemenuhan kebutuhan data bagi masyarakat	Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun	2 dokumen	27.833.000
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					70.000.000					70.000.000
2	21	2	2		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi					70.000.000					70.000.000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Target Capaian Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
2	21	2	2	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	26 PD	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Terwujudnya pelayanan pengamanan informasi pemerintah daerah dengan tersedianya TTE dan berita persandian menggunakan Aplikasi	20.000.000	DAU	Pelayanan TTE dan distribusi berita Persandian menggunakan Aplikasi sehingga bisa dilaksanakan dimana saja (Work From Anywhere)	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Terwujudnya pelayanan pengamanan informasi pemerintah daerah dengan tersedianya TTE dan berita persandian menggunakan Aplikasi	20.000.000
					Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Temanggung	1 Dokumen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektrnik dan Non Elektronik	Terwujudnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah dengan peningkatan penilaian indek KAMI	50.000.000	DAU	Digunakan untuk optimalisasi CSIRT yang mengundang narasumber dari BSSN untuk perlindungan Sistem Informasi yang ada di Perangkat daerah dari ancaman Insiden Cyber	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbsais Elektrmik dan Non Elektronik	Terwujudnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah dengan peningkatan penilaian indek KAMI	50.000.000
TOTAL										17.175.527.343					10.031.182.038

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinkominfo untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinkominfo Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinkominfo itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinkominfo dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinkominfo Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2023. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinkominfo Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 90,6%, dan realisasi Belanja Modal sebesar 4,5%, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan caturwulan pertama terdiri dari Belanja Operasional sebesar 15,5 %, dan realisasi Belanja Modal sebesar 0,04%.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2024 Dinkominfo mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 17.175.527.343,- yang terdiri dari 5 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinkominfo Tahun 2024 ini, cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dinkominfo dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 3 Juli 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197712121997031006